

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian**

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai profil dari kedua media nasional diantaranya Kompas.com dan Republika Online serta analisis berita dengan mempergunakan perangkat *framing* Pan dan Kosicki, yang kemudian hasilnya diperoleh dari perbandingan dari pembingkaiian netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan presiden 2024. Temuan-temuan dari penelitian ini akan dirangkum secara keseluruhan yang dikaitkan pada teori dan konsep dari penelitian ini, agar pembaca dapat memahami hasil yang telah diperoleh lebih mendalam.

##### **4.1.1 Profil Perusahaan Kompas.com**



Gambar 4.1 Logo Perusahaan Kompas.com

Kompas.com adalah contoh dari pelopor media online di Indonesia yang pertama kali hadir pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. Awalnya, Kompas Online hanya memuat ulang berita dari harian Kompas edisi terbaru dan mampu diakses melalui Kompas.co.id. Media ini dibuat agar membagikan informasi untuk pembaca harian Kompas yang bertempat tinggal di daerah terpencil atau sulit diakses oleh layanan distribusi. Dengan adanya Kompas Online, pembaca di Indonesia bagian timur serta luar negeri bisa mendapatkan berita terbaru pada hari yang sama, tidak harus menunggu beberapa hari (Kompas.com, 2023).

Kompas Gramedia adalah perusahaan yang mendirikan Kompas, Kompas.com didirikan oleh Jakob Oetama dan P.K. Ojong pada 28 Juni 1965. Harian Kompas yang awalnya berupa surat kabar dengan cepat menjadi sumber

berita terpercaya di Indonesia karena mengutamakan integritas dan akurasi dalam jurnalismenya. Pada 29 Mei 2008, media ini berganti nama menjadi Kompas.com untuk memperkuat identitasnya sebagai platform berita digital. Perubahan ini dilakukan agar lebih relevan dengan kebutuhan pembaca dan memastikan berita yang disampaikan tetap akurat dan bermanfaat di tengah banyaknya informasi yang tidak jelas kebenarannya. Pergantian nama ini juga menunjukkan komitmen Kompas.com untuk terus menjadi sumber berita yang dapat dipercaya (Kompas.com, 2023).

#### 4.1.2 Profil Perusahaan Republika Online



Gambar 4.2. Logo Perusahaan Republika Online

Republika Online (Republika.co.id) adalah contoh dari portal berita di Indonesia yang mulai beroperasi pada 17 Agustus 1995. Sebelumnya, Republika dikenal sebagai surat kabar harian yang pertama kali terbit pada 4 Januari 1993, dua tahun sebelum versi online-nya hadir. Republika lahir dari komunitas Muslim dengan dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), yang membantu memperoleh izin penerbitan dari pemerintah hingga bisa berkembang seperti sekarang. Republika Online menjadi pelopor media cetak pertama di Indonesia yang menyediakan berita melalui internet, dengan tujuan utama melayani pembaca yang tidak memiliki akses ke koran cetak atau yang berada di luar negeri. Seiring perkembangan teknologi, Republika Online terus bertransformasi, dari sekadar portal berita menjadi portal multimedia yang lengkap, menyesuaikan diri dengan perubahan industri akibat konvergensi media (Republika.co.id, 2024).

Republika Online (ROL) dibuat dengan tujuan menjadi media online yang terintegrasi dan memiliki kualitas tinggi. Selain itu, ROL juga berkomitmen untuk mendukung umat Islam agar menjadi lebih moderat, cerdas, dan berdaya, serta membantu menyampaikan aspirasi dan ide-ide masyarakat. Hal ini diharapkan

dapat mendorong terciptanya demokrasi yang sehat dan membawa kesejahteraan. ROL juga menyediakan wadah bagi umat untuk mengekspresikan diri (Republika.co.id, 2024).

## 4.2 Hasil dan Pembahasan

### A. Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

**Judul :** Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan.

**Sumber :** Kompas.com

**Tanggal :** 22, September 2023

**Ringkasan :** Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tentang isu strategis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Isu paling rawan terdapat di 22 provinsi yang terdiri dari 347 Kabupaten Kota.

Tabel 4.1. Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan.
	Lead	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN).
	Latar Informasi	Bawaslu mengumumkan hasil Indeks kerawanan netralitas ASN pada 10 Provinsi yang paling rawan.
	Kutipan Sumber,	Lolly Suhenty (Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI). 1. Kalau sudah tahu rawannya di mana, maka kita harusnya tahu formula mencegahnya seperti apa” 2. Faktor lainnya ketidakpahaman terhadap regulasi tentang kewajiban ASN menjaga netralitas. Faktor lainnya pula, karena adanya tekanan sanksi yang tidak membuat jera pelaku”
	Pernyataan Opini, Penutup.	- Artikel ini ditutup dengan komitmen Bawaslu yang mendorong sosialisasi kepada seluruh ASN secara

serentak terkait pentingnya ASN untuk bersikap netral dan melakukan optimalisasi patroli pengawasan siber di medsos yang berkolaborasi dengan Kemendagri, Komisis ASN, KemenPAN RB, Polri, dan Pemda.

<b>Struktur Skrip</b>	What	Masalah netralitas ASN sebagai isu strategis kerawanan pemilu.
	Where	Jakarta.
	When	21 September 2023.
	Who	Aparatur Sipil Negara (pelaku dan korban).
	Why	Faktor-faktor seperti keinginan mempertahankan jabata dan hubungan primordial, serta kurangnya pemahaman regulasi, dan lemahnya sanksi.
	How	Aparatur Sipil Negara terlibat mempromosikan kandidat dan menggunakan fasilitas negara atau mendukung melalui media sosial.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Keseluruhan artikel ini berisi mengenai netralitas ASN dalam menjaga integritas pemilu 2024. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan paragraf pertama yang memberikan data daerah paling rawan dalam isu netralitas ASN dan kedekatan antara ASN dan para calon yang mempromosikan atau mendukung para calon secara terbuka di sosial media dan media lainnya.. Kemudian di paragraf selanjutnya membahas tentang fasilitas negara yang digunakan ASN untuk mendukung kampanye para calon, baik ASN yang aktif atau pasif. Paragraf terakhir membahas tentang adanya motif primordial antara ASN dan para calon yang dihubungkan dengan keinginan mendapatkan dan mempertahankan jabatan masing-masing ASN.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	Penggunaan kata “primordial” dapat diartikan dengan perasaan seseorang yang menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai dan norma. Kata tersebut membuat pembaca memiliki makna ganda atau ambigu terhadap ingetritas ASN dalam pemilihan Presiden 2024. Kemudian dalam berita ini menggunakan foto ilustrasi para ASN yang sedang melakukan sumpah atau ikrar dalam menjalankan tugasnya, hal ini memiliki arti bahwa ASN harus bekerja dan memiliki kesanggupan untuk mentaati aturan dan tidak melanggar larangan yang sudah ditentukan. Sumpah tersebut diucapkan dihadapan

(Sumber: Olahan Peneliti)

## **Rincian Analisis**

### **1. Struktur Sintaksis**

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai hasil indeks data statistik yang dirilis oleh Bawaslu RI. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil temuan setara tingkat Provinsi sebanyak 22 dan Kabupaten Kota sebanyak 347, lalu kutipan sumber dari Lolly Suhenty (Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI) menjelaskan bahwa jika sudah terbukti faktual mengapa tidak ada upaya untuk mencegah isu tersebut dan faktor lainnya, karena adanya tekanan sanksi yang tidak membuat jera oknum tersebut.

### **2. Struktur Skrip**

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini, penulis telah menerapkan pada kelengkapan unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* menjelaskan mengenai Masalah netralitas ASN sebagai isu strategis kerawanan pemilu. Pada unsur *Where* dan *When* menjelaskan mengenai Terjadi di 22 Provinsi dan 347 Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan fokus pada 10 provinsi paling rawan. Pada unsur *Who* menjelaskan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban dan pelaku, serta kutipan dari Lolly Suhenty selaku Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI tentang upaya untuk melakukan pencegahan ketidak netralnya para ASN. Pada unsur *Why* dan *How* menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ASN tidak netral dan ditambah dengan penyalahgunaan fasilitas negara untuk mendukung para calon.

### **3. Struktur Tematik**

Dilihat dari struktur tematik pemberitaan ini, secara menyeluruh penulis ingin menyampaikan informasi tentang hasil indeks daerah rawan netralitas Aparatur Sipil Negara, setelah itu membahas bagaimana upaya Bawaslu dalam mencegah tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### 4. Struktur Retoris



Gambar 4.3. Artikel Berita 1 Kompas.com

Pada struktur retorik dalam artikel berita ini, penulis menuliskan narasi dengan kata “primordial” kata tersebut dapat diartikan sebagai perasaan yang memiliki ikatan sosial dan nilai-nilai norma yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada atasannya dan para calon presiden 2024. Foto dalam artikel berita ini menggunakan foto Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang mengucapkan ikrar atau janji sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### B. Analisis Artikel Berita 2 Kompas.com

**Judul :** Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral Dalam Pemilu, Apa Saja?

**Sumber :** Kompas.com

**Tanggal :** 22, September 2023

**Ringkasan:** Bawaslu RI mengungkapkan sejumlah masalah yang mendasar tentang penyebab dan motif Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pemilu 2024 di 22 Provinsi dan 347 Kabupaten kota.

Tabel 4.2. Analisis Artikel Berita 2 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral dalam Pemilu, Apa Saja?
	Lead	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan sejumlah masalah mendasar di balik masalah netralitas aparat sipil negara (ASN) dalam pemilu atau pilkada.

<b>Latar Informasi</b>	Penyebab dan motif ASN tidak netral dikarenakan staf jabatan rendah mendapat tekanan dari para pejabat struktural yang berkuasa dan minim tersentuh.
<b>Kutipan Sumber</b>	Lolly Suhenty (Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI) 1."Aspek kultural dan patronase dalam birokrasi yang dominan. Tekanan dari pimpinan". 2."Tawaran yang menggiurkan dari pejabat struktural untuk mendapatkan keuntungan seperti promosi jabatan, sebaliknya bawahan tidak mampu melakukan penolakan dengan ancaman-ancaman yang ada"
<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	- Artikel ini ditutup dengan pernyataan bahwa terdapat 10 Provinsi dari 22 Provinsi yang paling rawan dalam isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
<b>Struktur Skrip</b>	<p><b>What</b> Faktor dominan penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak Netral.</p> <p><b>Where</b> Jakarta dan Manado.</p> <p><b>When</b> 22, September 2023</p> <p><b>Who</b> Lolly Suhenty dan Aparatur Sipil Negara (ASN)</p> <p><b>Why</b> Tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu 2024 membuat sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pejabat struktural memberikan ancaman kepada bawahannya.</p> <p><b>How</b> Bawaslu bekerjasama dengan Kemendagri, KemenPAN RB, Polri dan Pemda untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya ASN untuk bersikap netral.</p>
<b>Struktur Tematik</b>	<p><b>Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.</b> Pada paragraf pertama dalam artikel berita ini menjelaskan tentang masalah mendasar yaitu netralitas yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral dalam pemilu dan pilkada di tahun 2024. Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang implementasi regulasi yang dinilai kurang dalam menjaga netralitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), karena banyak regulasi yang dibuat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kerap tidak dijalankan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Hal tersebut tidak di jalankan karena banyaknya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung atau mempromosikan whatsapp para calon pilkada dan</p>

---

pemilu baik lewat media sosial atau grup di whatsapp. Pejabat Struktural sebagai pemegang kekuasaan sering memberi ancaman kepada bawahan jika tidak mendukung para calon di pilkada dan pemilu. Kemudian di paragraf akhir menjelaskan tentang data statistik daerah yang paling rawan dalam segi netralitas, sebanyak 22 Provinsi dan 347 Kabupaten Kota berpotensi terjadi ketidaknetralitasnya para Aparatur Sipil Negara (ASN).

---

<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Foto yang digunakan dalam artikel berita ini adalah foto Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang mengucapkan sumpah atau ikrar yang diawasi oleh pejabat yang berwenang. Foto ini menerangkan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mematuhi semua peraturan yang telah dibuat.
-------------------------	------------------------------------	---

---

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis ini, penulis menjelaskan mengenai penyebab dan motif Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral dalam pemilu yang dijelaskan oleh Bawaslu. Penyebab dan motif masalah tersebut terjadi dikarenakan keinginan mendapatkan jabatan dan mempertahankan jabatan bagi pejabat struktural. Ditambah dengan kutipan Lolly Suhenty selaku perwakilan Bawaslu yang menjelaskan mengenai aspek kultural dan patronase dalam birokrasi yang tidak dijalankan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

### 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah memenuhi unsur 5W + 1H. Pada unsur *What* dalam artikel berita ini menjelaskan mengenai faktor dominan penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral. Unsur *Where* yaitu di Manado sebagai tempat launching pemetaan kerawanan pemilu lalu berita ini dibuat di Jakarta. Unsur *When* artikel berita ini dipublikasikan pada 22, September 2023 dan launching pemetaan kerawanan pemilu pada 21, September 2023. Pada unsur *who* melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Lolly Suhenty selaku perwakilan Bawaslu. Kemudian unsur *why*

yaitu tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu 2024 membuat sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pejabat struktural memberikan ancaman kepada bawahannya. Lalu unsur *How* menjelaskan Bawaslu bekerjasama dengan Kemendagri, KemenPAN RB, Polri dan Pemda untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya ASN untuk bersikap netral.

### 3. **Struktur Tematik**

Dilihat dari struktur tematik pemberitaan ini, penulis menyampaikan informasi pada paragraf awal artikel berita ini yaitu netralitas yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral dalam pemilu dan pilkada di tahun 2024. Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang implementasi regulasi yang dinilai kurang dalam menjaga netralitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), karena banyak regulasi yang dibuat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kerap tidak dijalankan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Hal tersebut tidak di jalankan karena banyaknya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung atau mempromosikan whatsapp para calon pilkada dan pemilu baik lewat media sosial atau grup di whatsapp. Pejabat Struktural sebagai pemegang kekuasaan sering memberi ancaman kepada bawahan jika tidak mendukung para calon di pilkada dan pemilu. Kemudian di paragraf akhir menjelaskan tentang data statistik daerah yang paling rawan dalam segi netralitas, sebanyak 22 Provinsi dan 347 Kabupaten Kota berpotensi terjadi ketidaknetralitasnya para Aparatur Sipil Negara (ASN).

### 4. **Struktur Retoris**

Dalam struktur retoris artikel berita ini menggunakan foto Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang mengucapkan sumpah atau ikrar yang diawasi oleh pejabat yang berwenang. Foto ini menerangkan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mematuhi semua peraturan yang telah dibuat.

### C. Analisis Artikel Berita 3 Kompas.com

**Judul** : Mayoritas ASN Langgar Netralitas Karena Kampanye Di Media Sosial Jelang Pemilu.

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 6, Oktober 2023

**Ringkasan** : Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menetapkan kegiatan yang paling banyak membuat pelanggaran netralitas ASN selama penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2024.

Tabel 4.3. Analisis Artikel Berita 3 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Mayoritas ASN Langgar Netralitas Karena Kampanye Di Media Sosial Jelang Pemilu.
	Lead	Mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melanggar netralitas dikarenakan melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial untuk mendukung pasangan calon (paslon) Pilkada dan Pemilu 2024.
	Latar Informasi	Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar netralitas karena mengadakan kegiatan yang mengacu pada keberpihakan ke salah satu calon atau bakal calon peserta pemilu sebanyak 22,4% dan di media sosial sebanyak 30,4%.
	Kutipan Sumber	Kompas.id 1. “Mayoritas ASN melanggar netralitas karena melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial sebanyak 30,4%.
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Artikel berita ini ditutup dengan informasi tambahan yang relevan terkait tahapan pemilu 2024 seperti Pemilu yang diadakan serentak, waktu masa kampanye Pemilu 2024, dan masa tenang Pemilu 2024.
Struktur Skrip	What	Pelanggaran ASN karena berkampanye di media sosial dan melakukan kegiatan bersama pasangan calon jelang Pemilu 2024.

Where	Jakarta.
When	6, Oktober 2023
Who	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Why	Pelanggaran netralitas terjadi karena mengadakan kegiatan yang mengacu keberpihakan ke salah satu calon atau bakal calon dan melakukan sosialisasi di media sosial. Hal tersebut disebabkan karena untuk kepentingan pribadi para pendukung.
How	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mencatat dan memberi sanksi kepada pelanggar netralitas yaitu pejabat fungsional, jabatan pelaksana, jabatan pimpinan, jabatan administrator dan pengawas.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat. Pada artikel berita ini paragraf pertama membahas pemetaan kegiatan yang paling banyak dalam membuat pelanggaran netralitas, kemudian KASN menjelaskan pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh ASN. Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang jenis pelanggaran beserta data yang telah dikalkulasikan oleh KASN berdasarkan jabatan, lalu para pelaku pelanggar netralitas tersebut diberi sanksi oleh Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK). Artikel berita ini ditutup dengan penjelasan tahapan Pemilu 2024 hingga pelaksanaan pemungutan suara serentak dimulai.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik Teks berita ini menekankan kata “pelanggaran netralitas ASN” hal ini tentunya bertujuan untuk menggambarkan kesalahan yang dilakukan oleh oknum ASN. Foto yang digunakan pada artikel berita ini yaitu foto Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang melaksanakan kegiatan upacara. Pemilihan foto ini bisa dikatakan kegiatan yang benar atau tidak melanggar adalah upacara tanpa adanya alat-alat kampanye.

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan tentang kebanyakan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pelanggaran netralitas dengan melakukan kampanye di media sosial dan mengadakan kegiatan bersama bakal calon Pilkada dan Pemilu 2024. Latar informasi artikel berita ini menjelaskan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar netralitas karena mengadakan kegiatan yang mengacu pada keberpihakan ke salah satu calon atau bakal calon peserta pemilu sebanyak 22,4% dan di media sosial sebanyak 30,4%. Hal ini dikuatkan dengan perincian wilayah yang merujuk laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dengan sedikitnya 10 Provinsi dan 10 Kabupaten Kota. Lalu penutup dalam artikel berita ini yaitu informasi tambahan yang relevan terkait tahapan pemilu 2024 seperti Pemilu yang diadakan serentak, waktu masa kampanye Pemilu 2024, dan masa tenang Pemilu 2024.

### 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah memenuhi kelengkapan unsur yaitu 5W + 1H. Pada unsur *what* menjelaskan mengenai pelanggaran Aparatur Sipil Negara karena berkampanye di media sosial dan melakukan kegiatan bersama pasangan calon jelang Pemilu 2024. Pada unsur *where* dan *when* yaitu di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2023. Pada unsur *who* melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian unsur *why* yaitu pelanggaran netralitas terjadi karena mengadakan kegiatan yang mengacu keberpihakan ke salah satu calon atau bakal calon dan melakukan sosialisasi di media sosial. Hal tersebut disebabkan karena untuk kepentingan pribadi para pendukung. Terakhir, pada unsur *how* menjelaskan tentang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mencatat dan memberi sanksi kepada pelanggar netralitas yaitu pejabat fungsional, jabatan pelaksana, jabatan pimpinan, jabatan administrator dan pengawas.

### 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik artikel berita ini, paragraf awal menjelaskan membahas pemetaan kegiatan yang paling banyak dalam membuat pelanggaran netralitas, kemudian KASN menjelaskan pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh ASN. Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang jenis pelanggaran beserta data yang telah dikalkulasikan oleh KASN berdasarkan jabatan, lalu para pelaku pelanggar netralitas tersebut diberi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Artikel berita ini ditutup dengan penjelasan tahapan Pemilu 2024 hingga pelaksanaan pemungutan suara serentak dimulai.

### 4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris pemberitaan ini menekankan asa kata “pelanggaran netralitas ASN” hal ini tentunya bertujuan untuk menggambarkan kesalahan yang dilakukan oleh oknum ASN. Foto yang digunakan pada artikel berita ini yaitu foto Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang melaksanakan kegiatan upacara. Pemilihan foto ini bisa dikatakan kegiatan yang benar atau tidak melanggar adalah upacara tanpa adanya alat-alat kampanye.

### D. Analisis Artikel Berita 4 Kompas.com

**Judul** : 10 Provinsi Ini Paling Rawan Langgar Netralitas ASN Pada Pemilu 2024.

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 6, Oktober 2024.

**Ringkasan** : Isu netralitas Aparatur Sipil Negara kembali marak pada saat berjalanya tahapan Pemilu 2024 dengan hasil data yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengukur daerah rawan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tabel 4.4. Analisis Artikel Berita 4 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksi</b>	Judul	10 Provinsi Ini Paling Rawan Langgar Netralitas ASN Pada Pemilu 2024
	Lead	Bawaslu merilis Indek Kerawanan Pemilu 2024 serta mengukur tingkar daerah yang rawan langgar netralias Aparatur Sipil Negara (ASN).
	Latar Informasi	Terdapat 20 poin Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu 10 poin Provinsi rawan pelanggaran netralitas dan 10 poin Kabupaten Kota rawan pelanggaran netralitas.
	Kutipan Sumber	-
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Artikel berita ini ditutup dengan pernyataan tahapan-tahapan pemilu mulai dari masa kampanye Pemilu 2024 hingga pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.
<b>Struktur Skrip</b>	What	10 Provinsi yang rawan langgar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024.
	Where	Jakarta.
	When	6 Oktober 2023
	Who	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Pejabat Pembina Kepegawaian.
	Why	Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar netralitas karena melakukan foto bersama pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan yang terindikasi keberpihakan, lalu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan hal tersebut untuk melakukan pendekatan ke partai politik untuk kepentingan dirinya atau orang lain di Pemilu 2024.
	How	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mentindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada 1.402 ASN yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Artikel berita ini dari awal hingga akhir membahas mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 yang terjadi di 10 Provinsi paling rawan dan 10 Kabupaten Kota paling rawan. Keputusan yang dibuat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan sanksi baru sebanyak 1.402 ASN atau 88,5%.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Artikel berita ini menggunakan foto Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang melakukan upacara.

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini penulis ingin menjelaskan mengenai 10 Provinsi Ini Paling Rawan Langgar Netralitas ASN Pada Pemilu 2024, lalu Bawaslu merilis Indek Kerawanan Pemilu 2024 serta mengukur tingkat daerah yang rawan langgar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didalamnya Terdapat 20 poin Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu 10 poin Provinsi rawan pelanggaran netralitas dan 10 poin Kabupaten Kota rawan pelanggaran netralitas. Pada artikel berita ini tidak ada pernyataan opini dan kutipan narasumber. Artikel berita ini ditutup dengan pernyataan tahapan-tahapan pemilu mulai dari masa kampanye Pemilu 2024 hingga pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

### 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi 5W + 1H. Pada unsur *what* disini menjelaskan mengenai 10 Provinsi yang rawan langgar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Pada unsur *where* dan *when* berita diterbitkan 6 Oktober 2023 dan lokasi di Jakarta. Unsur *who* dalam artikel berita ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Kemudian unsur menjelaskan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar netralitas karena melakukan foto bersama pasangan calon

dengan mengikuti simbol gerakan tangan yang terindikasi keberpihakan, lalu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan hal tersebut untuk melakukan pendekatan ke partai politik untuk kepentingan dirinya atau orang lain di Pemilu 2024. Lalu pada unsur *how* yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah bertindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada 1.402 ASN yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

### 3. Struktur Tematik

Dilihat dalam struktur tematik artikel berita ini berisi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 yang terjadi di 10 Provinsi paling rawan dan 10 Kabupaten Kota paling rawan. Keputusan yang dibuat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan sanksi baru sebanyak 1.402 ASN atau 88,5%.

### 4. Struktur Retoris

Dalam struktur retoris artikel berita ini terdapat Artikel berita ini menggunakan foto Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang melakukan upacara.

## E. Analisis Artikel Berita 5 Kompas.com

**Judul** : Bawaslu Waspadai Netralitas ASN Kabupaten Malang, IKP Tertinggi di Jatim.

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 6, November 2023

**Ringkasan** : Bawaslu Kabupaten Malang telah mewaspadai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Malang dalam pemilu 2024 mendatang, kewaspadaan ini berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI dan mengeluarkan hasil bahwa Kabupaten Malang memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Tabel 4.5. Analisis Artikel Berita 5 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Bawaslu Waspadai Netralitas ASN Kabupaten Malang, IKP Tertinggi di Jatim.
	Lead	Bawaslu Kabupaten Malang mewaspadai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malang dalam pemilu 2024. Hal ini disebabkan karena adanya potensi mobilisasi dalam pelaksanaan Pemilu.
	Latar Informasi	Kabupaten Malang menjadi daerah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain.
	Sumber,	Muhammad Wahyudi (Ketua Bawaslu Kabupaten Malang).
	Kutipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Kerawanan itu di antaranya adanya potensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan)."</li> <li>2. "Memang kita tidak bisa memantau siapa punya relasi dengan siapa. Tapi jangan sampai relasi itu menjadikan ASN bergantung. Sebab ASN terikat asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN."</li> <li>3. "Tahun 2019 lalu kami (Bawaslu Kabupaten Malang) merekomendasikan sampai empat pelanggaran ASN dan sudah ditindaklanjuti oleh KASN."</li> <li>4. "Alhamdulillah, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang merespon baik surat kami. Mereka memfasilitasi kami mengumpulkan ASN dan PPPK yang berada di lingkungan Kabupaten Malang untuk diberikan sosialisasi."</li> </ol>
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Artikel berita ini ditutup dengan keterangan dari Muhammad Wahyudin selaku ketua Bawaslu Kabupaten Malang bahwa Bawaslu Malang telah mengirim surat kepada Dinas Pendidikan sebagai tempat untuk memfasilitasi pengumpulan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK yang berada di lingkungan Kabupaten Malang untuk diberika

sosialisasi, serta data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi berada di 3 daerah Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang dengan skor 64,007, Kabupaten Kediri dengan skor 63,400, dan Kabupaten Bojonegoro dengan skor 55,756.

<b>Struktur Skrip</b>	What	Bawaslu telah mewaspadai daerah Kabupaten Malang terkait netralitas dengan skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Jawa Timur.
	Where	Malang, Jawa Timur.
	When	6, November 2023
	Who	Muhammad Wahyudi
	Why	Kerawanan yang dimaksud oleh Bawaslu ini ialah adanya potensi “abuse of power” atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya data Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu RI untuk daerah Jatim khususnya Kabupaten Malang cukup tinggi. Hal tersebut dibenarkan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Malang karena adanya mobilisasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan kerawanan yang sering terjadi ialah relasi pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pihak lain yang menimbulkan pengaruh dalam pilihan politiknya.
	How	Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan tindak lebih lanjut untuk mencegah masalah tersebut karena Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat asas netralitas yang tercatat dalam Undang-Undang No.5/2014 tentang ASN. Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pencegahan dengan cara mengundang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK dengan memberikan sosialisasi.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Di awal teks berita ini, penulis menyampaikan fakta terkait kerawanan netralitas di Kabupaten Malang. Setelah itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang menjelaskan faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tiak netral dan membuat cara

		untuk mencegah agar tidak ada lagi yang melakukan kesalahan tersebut. Diakhir berita menjelaskan tentang data yang menunjukkan daerah di Jawa Timur yang memiliki skor Indeks Kerawanan Pemilu 2024 tertinggi.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Terdapat penekanan pada kata “Abuse Of Power” dan “Netralitas ASN”, kata tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang sering dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu yaitu netralitas. Foto dalam artikel berita ini hanya menunjukkan foto Ketua Bawaslu Kabutapen Malang yaitu Muhammad Wahyudi.

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Dilihat dari struktur sintaksis pada artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan kerawanan netralitas yang terjadi di Kabupaten Malang. Pada *lead* menjelaskan Bawaslu Kabupaten Malang mewaspadaikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malang dalam pemilu 2024. Hal ini disebabkan karena adanya potensi mobilisasi dalam pelaksanaan Pemilu. Sedangkan latar Informasi artikel berita ini ialah Kabupaten Malang menjadi daerah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Pada unsur sumber dikutip hanya jawaban dari Ketua Bawaslu Kabupaten Malang yaitu Muhammad Wahyudi, penulis dapat menarik garis besar dari 4 kutipan yaitu Bawaslu Kabupaten Malang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah masalah ini agar tidak seperti tahun 2019. Tidak ada pernyataan opini dalam teks artikel berita ini, penulis hanya mengandalkan fakta dan informasi yang disampaikan oleh narasumber. Artikel ini ditutup dengan keterangan dari Muhammad Wahyudin selaku ketua Bawaslu Kabupaten Malang bahwa Bawaslu Malang telah mengirim surat kepada Dinas Pendidikan sebagai tempat untuk memfasilitasi pengumpulan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK yang berada di lingkungan Kabupaten Malang untuk diberika

sosialisasi, serta data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi berada di 3 daerah Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang dengan skor 64,007, Kabupaten Kediri dengan skor 63,400, dan Kabupaten Bojonegoro dengan skor 55,756.

## 2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip terdapat unsur 5W + 1H, pada unsur *what* yaitu Bawaslu telah mewaspadai daerah Kabupaten Malang terkait netralitas dengan skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Jawa Timur. Unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi dan waktu pertemuan narasumber yaitu Muhammad Wahyudi Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Malang. Unsur *who* sebagai narasumber yang memberikan upaya untuk mencegah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Muhammad Wahyudi. Pada unsur *why* menjelaskan mengenai Kerawanan yang dimaksud oleh Bawaslu ini ialah adanya potensi “abuse of power” atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya data Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu RI untuk daerah Jatim khususnya Kabupaten Malang cukup tinggi. Hal tersebut dibenarkan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Malang karena adanya mobilisasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan kerawanan yang sering terjadi ialah relasi pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pihak lain yang menimbulkan pengaruh dalam pilihan politiknya. Sedangkan pada unsur *how* menjelaskan Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan tindak lebih lanjut untuk mencegah masalah tersebut karena Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat asas netralitas yang tercatat dalam Undang-Undang No.5/2014 tentang ASN. Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pencegahan dengan cara mengundang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK dengan memberikan sosialisasi.

## 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam berita ini, penulis menjelaskan fakta terkait kerawanan netralitas di Kabupaten Malang. Setelah itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang menjelaskan faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral dan membuat cara untuk mencegah agar tidak ada

lagi yang melakukan kesalahan tersebut. Diakhir berita menjelaskan tentang data yang menunjukkan daerah di Jawa Timur yang memiliki skor Indeks Kerawanan Pemilu 2024 tertinggi.

#### 4. Struktur Retoris

Pada struktur retorik dalam berita ini, Terdapat penekanan pada kata “Abuse Of Power” dan “Netralitas ASN”, kata tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang sering dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu yaitu netralitas. Foto dalam artikel berita ini hanya menunjukkan foto Ketua Bawaslu Kabutapen Malang yaitu Muhammad Wahyudi.

#### F. Analisis Artikel Berita 6 Kompas.com

- Judul** : Saling Tuduh Soal Netralitas Aparat Jelang Pemilu 2024.
- Sumber** : Kompas.com
- Tanggal** : 19, November 2023
- Ringkasan** : Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilu setelah Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029.

Tabel 4.6. Analisis Artikel Berita 6 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Saling Tuduh Soal Netralitas Aparat Jelang Pemilu 2024
	Lead	Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin memuncak setelah putra Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka resmi berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wakil presiden.
	Latar Informasi	Isu ini semakin memanas setelah keputusan pencalonan Gibran melibatkan cawe-cawe atau campur tangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan membuat

#### Sumber

lawan-lawan politik Prabowo dan Jokowi mulai bersuara.

1. Hasto Kristiyanto (Sekertaris Jenderal PDI-P).
2. Aiman Witjaksono (Juru Bicara Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD).
3. Komjen Pol Fadil Imran (Kabaharkam).
4. M Said Hidayat (Bupati Boyolali)
5. Fadli Ramadhanil (Manajer Perludem).
6. Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI).
7. Lolly Suhenty (Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI).

#### Kutipan

1. "Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama."
2. "Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman di kepolisian mereka keberatan diminta komandannya yang mengarahkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran," kata Aiman lewat akun Instagramnya.
3. - "Siapa, kan katanya banyak, nanti kita klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja siapa orangnya buka, jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab."  
- "Jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat pada terganggunya kesadaran publik."
4. "Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Semua pernah mendengarkan?"
5. - "Yang paling penting adalah mereka mengimplementasikan bersikap netral tidak berpihak dan tidak curang itu dalam tindak tanduk dan kegiatannya, aktivitasnya sehari-hari."

- "Untuk apa kemudian berulang kali bilang netral, tidak akan berpihak di depan publik, tapi ketika melaksanakan tugas-tugas yang tidak ter-cover atau tidak terpublikasikan di ruang publik itu dikerjakan sebaliknya. Nah ini yang menjadi khawatir."

6. - "Itu dalam (potensi kerawanannya). Sangat dalam, ya, tinggi lah. Makanya jadi perhatian kami."

- "Kami sedang menginvestigasi beberapa kejadian (ketidaknetralan aparat) di lapangan karena ada beberapa berita yang harus diklarifikasi kepada teman-teman Bawaslu di daerah."

- "Program-program pemerintah atau program yang berkaitan dengan negara juga itu diajukan untuk kepentingan peserta pemilu tertentu, itu juga tidak boleh."

7. - "Aspek kultural dan patronase dalam birokrasi yang dominan. Tekanan dari pimpinan."

- "Tawaran yang menggiurkan dari pejabat struktural untuk mendapatkan keuntungan seperti promosi jabatan, sebaliknya bawahan tidak mampu melakukan penolakan dengan ancaman-ancaman yang ada."

Artikel berita ini ditutup dengan isu netralitas ini kebanyakan dilakukan oleh pejabat struktural yang memegang kuasa tidak banyak tersentuh dan lebih sering berperan sebagai perantara, sedangkan para staf bawahan berada di posisi yang lebih rentan menjadi korban. Lalu, 10 Provinsi dinilai menjadi kawasan yang paling rawan dalam isu ini.

Pernyataan Opini  
Penutup

<b>Struktur Skrip</b>	What	Isu netralitas semakin memanas setelah putra Joko Widodo berpasangan dengan Prabowo Subianto dan keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
	Where	Jakarta.
	When	19 November 2023

	Who	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasto Kristiyanto (Sekertaris Jenderal PDI-P).</li> <li>2. Aiman Witjaksono (Juru Bicara Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD).</li> <li>3. Komjen Pol Fadil Imran (Kabaharkam).</li> <li>4. M Said Hidayat (Bupati Boyolali)</li> <li>5. Fadli Ramadhanil (Manajer Perludem).</li> <li>6. Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI).</li> <li>7. Lolly Suhenty (Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI).</li> </ol>
	Why	<p>Setelah hasil keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di sahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, banyak tuduhan yang muncul terkait isu netralitas Aparatur Sipil Negara dan banyak ASN turun kelapangan dengan alih sekesar deklarasi.</p>
	How	<p>Bawaslu menyatakan banyak ASN yang mempromosikan kandidat tertentu dan memberikan dukungan secara terbuka melalui media sosial dan media lainnya, serta Bawaslu menemukan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung kandidat dan adanya ASN secara aktif maupun pasir terlibat dalam kampanye.</p>
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	<p>Secara keseluruhan penulis artikel berita ini menyampaikan tentang isu netralitas ASN. Isi dari artikel berita ini kebanyakan kutipan dari narasumber yang berisi tentang netralitas pada setiap konstitusi yang ada di Indonesia.</p>
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	<p>Dalam artikel berita ini ada istilah kata “cawe-cawe”, kata ini dapat diartikan sebagai campur tangan orang yang memegang kuasa untuk melakukan suatu hal, serta banyak penekanan kata netralitas yang ditujukan untuk setiap konstitusi. Isu ini semakin panas setelah Ketua Mahkamah Konstitusi membuat keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>Foto dalam artikel berita ini adalah benderan-bendera partai politik yang berada di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), foto ini dapat diartikan memiliki makna yang</p>

---

sesuai dengan judul berita yaitu masing-masing partai politik melakukan tuduhan menjelang pemilu 2024.

---

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada unsur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis mencoba menjelaskan mengenai tuduhan isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin memuncak setelah putra Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka resmi berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wakil presiden. Pada artikel berita ini banyak kutipan yang dapat diambil kesimpulan yaitu isu oknum polisi tidak netral, oknum ASN tidak netral, dan banyaknya oknum yang terlibat dalam netralitas bermuka dua atau sikap seseorang yang berbeda-beda di hadapan orang lain. Artikel ini ditutup dengan isu netralitas ini kebanyakan dilakukan oleh pejabat struktural yang memegang kuasa tidak banyak tersentuh dan lebih sering berperan sebagai perantara, sedangkan para staf bawahan berada di posisi yang lebih rentan menjadi korban. Lalu, 10 Provinsi dinilai menjadi kawasan yang paling rawan dalam isu ini.

### 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini sudah mencakup keseluruhan unsur 5W + 1H. Pada unsur *what* menjelaskan mengenai Isu netralitas semakin memanas setelah putra Joko Widodo berpasangan dengan Prabowo Subianto dan keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Pada unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu Jakarta pada tanggal 19, November 2023. Pada unsur *who* menjelaskan mengenai kutipan yang disampaikan oleh Hasto Kristiyanto (Sekertaris Jenderal PDI-P), Aiman Witjaksono (Juru Bicara Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD), Komjen Pol Fadil Imran (Kabaharkam), M Said Hidayat (Bupati Boyolali), Fadli Ramadhanil (Manajer Perludem), Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI), dan Lolly Suhenty (Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas

Bawaslu RI. Pada unsur *why* menjelaskan tentang hasil keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di sahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, banyak tuduhan yang muncul terkait isu netralitas Aparatur Sipil Negara dan banyak ASN turun kelapangan dengan alih sekesar deklarasi. Lalu, unsur *how* menjelaskan Bawaslu menyatakan banyak ASN yang mempromosikan kandidat tertentu dan memberikan dukungan secara terbuka melalui media sosial dan media lainnya, serta Bawaslu menemukan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung kandidat dan adanya ASN secara aktif maupun pasif terlibat dalam kampanye.

### 3. Struktur Tematik

Pada unsur tematik dalam artikel berita ini adalah Secara keseluruhan penulis artikel berita ini menyampaikan tentang isu netralitas ASN. Isi dari artikel berita ini kebanyakan kutipan dari narasumber yang berisi tentang netralitas pada setiap konstitusi yang ada di Indonesia.

### 4. Struktur Retoris

Pada struktur retorik dalam artikel berita ini ada istilah kata “cawe-cawe”, kata ini dapat diartikan sebagai campur tangan orang yang memegang kuasa untuk melakukan suatu hal, serta banyak penekanan kata netralitas yang ditujukan untuk setiap konstitusi. Isu ini semakin panas setelah Ketua Mahkamah Konstitusi membuat keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Foto dalam artikel berita ini adalah bendera-bendera partai politik yang berada di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), foto ini dapat diartikan memiliki makna yang sesuai dengan judul berita yaitu masing-masing partai politik melakukan tuduhan menjelang pemilu 2024.

## G. Analisis Artikel Berita 7 Kompas.com

**Judul** : Bawaslu Ungkap Penyebab Polarisasi Pemilu : Medsos, Netralitas ASN, dan Politik Identitas.

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 6, Desember 2023

**Ringkasan** : Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Herwyn JH Malonda menegaskan polarisasi atau keterbelahan di masyarakat akan terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Terdapat tiga faktor yang akan menyebabkan polarisasi yaitu media sosial, keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan politik identitas.

Tabel 4.7. Analisis Artikel Berita 7 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksi</b>	Judul	Bawaslu Ungkap Penyebab Polarisasi Pemilu : Medsos, Netralitas ASN, dan Politik Identitas.
	Lead	Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn JH Malonda menyebut polarisasi atau keterbelahan masyarakat akan terjadi selama pemilu 2024.
	Latar Informasi	Mennurut Herwyn polarisasi yang terjadi di media sosial berupa unggahan atau komentar yang bersifat provokatif, sehingga membuat masyarakat menjadi kelompok-kelompok politik yang berbeda.
	Sumber	Herwyn JH Malonda (Anggota Bawaslu RI) dan Lolly Suhenty (Koordiv Bawaslu RI)
	Kutipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Ini tempatnya penyebaran informasi yang paling masif. Informasi yang tidak tervalidasi bisa saja membuat persoalan hubungan persaudaraan kita bermasalah."</li> <li>2. "Kurangya pelayanan publik yang merata, risiko manipulasi dalam pemilihan umum, pengurangan kepercayaan publik, dan meningkatnya politisasi birokrasi".</li> <li>3. "Apabila saling provokasi dan intimidasi tidak dikelola dengan baik, maka dinamika konflik akan berkembang dengan cepat dan menjadi sangat kekerasan (brutal). Berakhir dengan bentrokan antar kelompok atau kerusuhan massal yang berkepanjangan".</li> </ol>
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Lolly Suhenty yang mengtakan jika provokasi dan intimidasi tidak dapat dikelola dengan baik, maka dinamika konflik akan semakin brutal

hingga terjadi bentrokan antar kelompok atau kerusuhan massal yang berkepanjangan. Lalu artikel ini ditutup juga dengan masa kampanye atau jadwal kampanye yang akan berlangsung selama 75 hari, terhitung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

<b>Struktur Skrip</b>	<p>What</p> <p>Where</p> <p>When</p> <p>Who</p> <p>Why</p> <p>How</p>	<p>Bawaslu mengungkap penyebab adanya polarisasi pemilu yaitu media sosial, netralitas Aparatur Sipil Negara, dan politik identitas. Jakarta dan Bandung.</p> <p>6, Desember 2023</p> <p>Herwyn JH Malonda (anggota Bawaslu RI) dan Lolly Suhenty (Koordiv Bawaslu RI).</p> <p>Polarisasi pemilu terjadi di media sosial, keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan politik identitas. Polariassi ini terjadi karena sikap dan pandangan yang berbeda pada setiap individu dalam sebuah instansi, lalu ASN yang berpihak juga berpotensi menyalahgunakan sumber daya publik.</p> <p>Untuk pencegahan terjadinya polarisasi pemilu lebih lanjut harus melakukan pengawasan terhadap media sosial, memberikan pandangan politik ke pemilih, pelatihan penguatan kompetensi bagi penyelenggara pemilu, dan kerja sama dengan aparat seperti TNI, Polri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).</p>
<b>Struktur Tematik</b>	<p>Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.</p>	<p>Pada paragraf pertama menjelaskan faktor yang menyebabkan polarisasi itu terjadi serta Undang-Undang yang mengatur netralitas tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah polarisasi pemilu ini agar tidak berlanjut lebih jauh dengan melakukan kerjasama antara Bawaslu dan Lembaga terkait. Pada paragraf terakhir menjelaskan akibat terjadinya polarisasi pemilu dan jadwal masa kampanye hingga digelarnya penmungutan suara serentakk di seluruh Indonesia.</p>

<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Dalam artikel berita ini menampilkan gambar masyarakat yang sedang melakukan pemilihan suara. Hal ini bisa di asumsikan bahwa pemungutan suara akan berjalan dengan baik jika tidak ada polarisasi berkepanjangan dalam pemilu 2024.
-------------------------	-----------------------------	--

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini penulis mencoba menjelaskan mengenai polarisasi pemilu 2024 yang diungkapkan oleh Bawaslu RI dan dalam artikel berita ini menjelaskan mengenai tanggapan dari anggota Bawaslu RI dan Koordiv Bawaslu RI tentang adanya polarisasi pemilu 2024. Dalam artikel berita ini juga adanya kutipan yang menjelaskan media sosial sebagai penyebar informasi yang cepat dan luas serta kurangnya pelayanan publik secara merata yang mengabitkan politisasi birokrasi tidak baik. Artikel berita ini ditutup dengan kutipan dari Lolly Suhenty yang mengatakan jika provokasi dan intimidasi tidak dapat dikelola dengan baik, maka dinamika konflik akan semakin brutal hingga terjadi bentrokan antar kelompok atau kerusuhan massal yang berkepanjangan. Lalu artikel ini ditutup juga dengan masa kampanye atau jadwal kampanye yang akan berlangsung selama 75 hari, terhitung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

### 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah memenuhi unsur 5W + 1H. Pada unsur *what* menjelaskan mengenai Bawaslu mengungkap penyebab adanya polarisasi pemilu yaitu media sosial, netralitas Aparatur Sipil Negara, dan politik identitas. Pada unsur *where* dan *when* telah menjawab mengenai lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu 6 Desember 2023 yang berlokasi di Jakarta dan Bandung. Pada unsur *who* menjelaskan pernyataan yang diungkapkan oleh Lolly Suhenty (Koordiv Bawaslu RI) dan Herwyn JH Malonda (Anggota Bawaslu RI). Pada unsur *why* menjelaskan mengenai polarisasi pemilu terjadi di media sosial, keberpihakan Aparatur Sipil

Negara (ASN), dan politik identitas. Poliarisasi ini terjadi karena sikap dan pandangan yang berbeda pada setiap individu dalam sebuah instansi, lalu ASN yang berpihak juga berpotensi menyalahgunakan sumber daya publik. Sedangkan dalam unsur *how* menjelaskan mengenai pencegahan terjadinya polarisasi pemilu lebih lanjut harus melakukan pengawasan terhadap media sosial, memberikan pandangan politik ke pemilih, pelatihan penguatan kompetensi bagi penyelenggara pemilu, dan kerja sama dengan aparat seperti TNI, Polri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

### 3. Struktur Tematik

Pada unsur tematik dalam artikel berita ini yaitu pada paragraf pertama menjelaskan faktor yang menyebabkan polarisasi itu terjadi serta Undang-Undang yang mengatur netralitas tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah polarisasi pemilu ini agar tidak berlanjut lebih jauh dengan melakukan kerjasama antara Bawaslu dan Lembaga terkait. Pada paragraf terakhir menjelaskan akibat terjadinya polarisasi pemilu dan jadwal masa kampanye hingga digelarnya pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

### 4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris dalam artikel berita ini menggunakan gambar masyarakat yang sedang melakukan pemilihan suara. Hal ini bisa di asumsikan bahwa pemungutan suara akan berjalan dengan baik jika tidak ada polarisasi berkepanjangan dalam pemilu 2024.

## H. Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com

**Judul** : Kominfo Awasi Netralitas ASN Di Ruang Digital, “Like” Unggahan Kampanye Dilarang.

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 4 Desember 2023

**Ringkasan** : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengingatkan netralitas Aparatur Sipil pada masa Pemilu 2024.

Tabel 4.8. Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Komindo Awasi Netralitas ASN Di Ruang Digital, “Like” Unggahan Kampanye Dilarang.
	Lead	Dirjen Kominfo mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Usman Kansog menyatakan telah memantau seluruh aktivitas ASN di media sosial.
	Latar Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk menyukai kampanye di media sosial. Jika terdapat adanya pelanggaran, ASN akan mendapat hukuman berupa sanksi administrasi hingga pidana.
	Kutipan Sumber	Usman Kansog (Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). 1. "ASN untuk nge-like aja itu dilarang. Untuk nge-like kampanye-kampanye di medsos itu dilarang." 2. "Nah, selain kita memantau hoaks ya, bahkan Kominfo juga ikut serta dalam memantau dan mengawasi netralitas ASN di ruang digital." 3. "Jadi, hukuman atau sanksi buat ASN itu sudah diatur di dalam UU tentang ASN. Jadi ada UU yang baru tentang ASN. Hukumannya bahkan bisa dari administrasi sampai pidana. Tergantung pelanggarannya seperti apa. Nanti komisi ASN yang akan menilai."
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Artikel berita ini ditutup dengan 10 daftar provinsi yang tercatat memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan tingkat pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Struktur Skrip	What	Kominfo telah mengawasi kegiatan Aparatur Sipil Negara di ruang digital seperti <i>like</i> unggahan kampanye pemilu 2024.
	Where	Gedung Kominfo, Jakarta.

	When	4, Desember 2023
	Who	Usman Kansog (Dirjen Kominfo)
	Why	Dilarangnya menyukai unggahan kampanye di media sosial karna dianggap mendukung salah satau peserta pemilu.
	How	Usman Kansog sebagai Dirjen Kominfo telah berkomitmen dan kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar membuat tindakan jika Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran netralitas di ruang digital.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Pada paragraf pertama menjelaskan peringatan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 dan menyatakan bahwa ASN dilarang melakukan aktivitas di medsos. Paragraf selanjutnya menjelaskan bentuk-bentuk apa saja yang merupakan sebuah pelanggaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang digital. Lalu, paragraf terakhir menerangkan hasil rilis Indeks Kerawanan Pemilu dari Bawaslu.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Foto yang digunakan pada artikel berita ini adalah sebuah ilustrasi media sosial dengan adanya simbol hati dan like yang dapat diartikan sebagai suka terhadap sebuah postingan.

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara di ruang digital atau media sosial. Ditambah dengan kutipan yang diberikan oleh Usman Kansong terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan hukuman atau sanksi buat ASN itu sudah diatur di dalam Undang-Undang tentang ASN. Hukumannya bahkan bisa dari administrasi sampai pidana. Artikel ini ditutup dengan 10 daftar provinsi yang tercatat memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan tingkat pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

## 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* menjelaskan Kominfo telah mengawasi kegiatan Aparatur Sipil Negara di ruang digital seperti *like* unggahan kampanye pemilu 2024. Pada unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi konferensi pers Kominfo dan waktu konferensi pers dilakukan yaitu 4 Desember 2023 di Gedung Kominfo Jakarta. Pada unsur *who* disini yaitu Usman Kansong dan oknum Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pelanggaran netralitas. Pada unsur *why* menjelaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menyukai unggahan kampanye di media sosial karna dianggap mendukung salah satau peserta pemilu. Sedangkan unsur *how* menjelaskan yaitu Usman Kansog sebagai Dirjen Kominfo telah berkomitmen dan kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar membuat tindakan jika Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran netralitas di ruang digital.

## 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu Pada paragraf pertama menjelaskan peringatan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 dan menyatakan bahwa ASN dilarang melakukan aktivitas di medsos. Paragraf selanjutnya menjelaskan bentuk-bentuk apa saja yang merupakan sebuah pelanggaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang digital. Lalu, paragraf terakhir menerangkan hasil rilis Indeks Kerawanan Pemilu dari Bawaslu.

## 4. Struktur Retoris

Pada struktur retorik dalam artikel berita ini menampilkan foto sebuah ilustrasi media sosial dengan adanya simbol hati dan like yang dapat diartikan sebagai suka terhadap sebuah postingan.

### I. Analisis Artikel Berita 9 Kompas.com

**Judul** : Pelanggaran Netralitas ASN Marak, Komitmen Pemerintahan Jokowi Disorot.

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 18, Januari 2024

**Ringkasan** : Banyaknya isu pelanggaran dalam pemilu 2024 terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tabel 4.9. Analisis Artikel Berita 9 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Pelanggaran Netralitas ASN Marak, Komitmen Pemerintahan Jokowi Disorot
	Lead	Isu pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu 2024 cukup banyak dalam pemerinthan Presiden Joko Widodo.
	Latar Informasi	Isu ini disampaikan oleh Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara dengan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN.
	Sumber Kutipan	Bivitri Susanti 1. "Pak Jokowi-nya sendiri tidak menunjukkan netralitas, misalnya, ketika dia berkomentar tentang debat kemarin." 2. "Walaupun tidak berhubungan langsung, buat saya, ketika pemimpin tertinggi ASN (Presiden), ketika dia sudah menunjukkan tidak netral, menunjukkan dukungan dengan makan siang dan lain-lain, maka itu sudah memberikan isyarat kepada jajaran di bawahnya supaya bersikap sama dengan Pak Jokowi." 3. "Harus dibuktikan lebih lanjut oleh Bawaslu, tapi memang ini sudah ada langkah-langkah yang memang sudah membuktikan bahwa ada benturan kepentingan yang terjadi sehingga memengaruhi struktur birkorasi, bagaimana dia berjalan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu."
	Pernyataan Opini	Penyataan opini dalam artikel berita ini disampaikan oleh Bivitri Susanti yaitu Bawaslu harus mengungkapkan hasil investigasi kepada publik terkait dugaan pelanggaran netralias ASN sebagai lembaga indepen.

	Penutup		Artikel berita ini ditutup dengan pernyataan opini yang dapat dijelaskan yaitu Bawaslu harus membuktikan adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, serta benturan kepentingan yang terjadi dan memengaruhi struktur birokrasi.
<b>Struktur Skrip</b>	What		Dugaan pelanggaran netralitas ASN selama pemerintahan Jokowi.
	Where		Program Kompas Petang di Kompas TV, Jakarta.
	When		18, Januari 2024
	Who		Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara)
	Why		Adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pemerintahan Jokowi, hal ini disebabkan karena Jokowi tidak tegas dalam menerapkan imbauan netralitas dan akhirnya ditiru oleh birokrat sampai tingkat bawah.
	How		Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara menghimbau agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat memeriksa semua kasus dugaan pelanggaran secara independen dan mendalam.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Hubungan antar kalimat.	Proporsi kalimat,	Dalam artikel berita ini dari awal hingga akhir menjelaskan mengenai kurangnya komitmen dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mengakibatkan kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Contohnya kasus yang terjadi adalah Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalah mengajak untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibrak Rakabuming Raka.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik		Penggunaan kata “dugaan” dalam artikel berita ini ditunjukan kepada pelanggaran netralitas ASN dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyebabkan birokrasi dari atas sampai bawah meniru hal tersebut.

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai Isu pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu 2024 cukup banyak dalam pemerinthan Presiden Joko Widodo. Dalam artikel ini secara keseluruhan merupakan opini dari narasumber yaitu Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara, opini tersebut ialah Bawaslu harus mengungkapkan hasil investigasi kepada publik terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN sebagai lembaga indepen, lalu artikel berita ini ditutup dengan pernyataan opini yang dapat dijelaskan yaitu Bawaslu harus membuktikan adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, serta benturan kepentingan yang terjadi dan memengaruhi struktur birokrasi.

### 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* menjelaskan mengenai Dugaan pelanggaran netralitas ASN selama pemerintahan Jokowi. Pada unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu Kompas TV di Jakarta. Pada unsur *who* yaitu Bivitri Susanti banyak memberikan kritik dan saran terhadap lembaga-lembaga independen pemilu. Pada unsur *why* menjelaskan mengenai adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pemerintahan Jokowi, hal ini disebabkan karena Jokowi tidak tegas dalam menerapkan imbauan netralitas dan akhirnya ditiru oleh birokrat sampai tingkat bawah. Sedangkan unsur *how* menjelaskan Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara menghimbau agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat memeriksa semua kasus dugaan pelanggaran secara independen dan mendalam.

### 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu artikel berita ini dari awal hingga akhir menjelaskan mengenai kurangnya komitmen dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mengakibatkan kasus pelanggaran

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Contohnya kasus yang terjadi adalah Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar mengajak untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibrak Rakabuming Raka.

#### 4. Struktur Retoris

Pada struktur retorik dalam artikel berita ini banyak penggunaan kata “dugaan” yang ditunjukkan kepada pelanggaran netralitas ASN dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyebabkan birokrasi dari atas sampai bawah meniru hal tersebut.

#### J. Analisis Artikel Berita 10 Kompas.com

**Judul** : Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 31, Januari 2024

**Ringkasan** : Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebutkan tren pelanggaran netralitas ASN mulai meningkat menjelang Pemilu 2024 dan diprediksi akan terus bertambah.

Tabel 4.10. Analisis Artikel Berita 10 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan.
	Lead	Pelanggaran netralitas ASN mulai meningkat menjelang Pemilu 2024 setelah menekan perjanjian kerja sama antara KASN dan Bawaslu.
	Latar Informasi	Data 2022 terdapat 15 ASN yang melanggar netralitas yang mengarah kepada kontestasi politik 2024 dan angka ini terus meningkat pada tahun 2023.
	Sumber Kutipan	Agus Pramusinto (Ketua KASN).

1. "Tren pelanggaran netralitas sudah mulai meningkat. Kalau kita lihat data KASN 2022 terdapat 15 ASN yang melanggar netralitas yang mengarah kepada kontestasi politik 2024."

2. "Angka ini tentu saja berpotensi meningkat pada 2023 seiring dengan bergulirnya tahapan pemilu dan pemilihan serentak,"

3. Bila diamati lebih jauh lagi, sejumlah 47,1 persen dari pelanggaran netralitas ASN terjadi pada masa sebelum kampanye. Modus pelanggaran yang terbanyak pun adalah kampanye atau sosialisasi di media sosial sejumlah 30,4 persen."

4. "Kemudian disusul oleh kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon (22,4 persen) dan melakukan foto bersama dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau yang menunjukkan keberpihakan (12,6 persen)."

5. "Itu sering terjadi dan tentu saja kita tidak ingin karena politik praktis ASN terjadi friksi. Bagaimana mungkin ASN menjadi perekat NKRI kalau dia sendiri menjadi pemain yang menghancurkan kesatuan NKRI itu sendiri."

Pernyataan opini dalam artikel berita ini ialah "Jika netralitas ASN tidak diawasi tentunya akan menciptakan fenomena dimana ASN yang hendak bekerja akan menempel-nempel calon yang diprediksi menang pemilu, munculnya politik balas budi hingga politik balas dendam.

Artikel berita ini ditutup dengan kutipan Agus Pramusinto yang menyatakan netralitas sering terjadi dan tentu tidak ingin terjadi, hal ini dikarenakan politik praktis ASN terjadi friksi.

Pernyataan Opini

Penutup

---

<b>Struktur Skrip</b>	What	Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara meningkat menjelang pemilu 2024 dan masa sebelum kampanye dinilai paling rawan.
	Where	Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta.
	When	31, Januari 2024

Who	Agus Pramusinto (Ketua KASN)
Why	Pelanggaran netralitas ASN terjadi karena munculnya politik balas budi dan politik balas dendam dalam Pemilu 2024.
How	Ketua Kasn melakukan kerja sama dengan Bawaslu dengan melakukan 5 butir kesepakatan salah satunya pertukaran data dan informasi. Kedua belah pihak sepakat membuat Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN (Siapnet).
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat. Pada paragraf pertama menjelaskan tren pelanggaran netralitas mulai meningkat menjelang pemilu 2024 dan diprediksi akan terus bertambah. Paragraf selanjutnya menjelaskan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh KASN dan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran netralitas. Sedangkan di paragraf akhir menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pelanggaran.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik Terdapat penggunaan frasa “friksi” yang memiliki dua makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat dan perpecahan. Hal ini dapat disambungkan dengan adanya pelanggaran ASN yang berpihak kepada salah satu pasangan calon. Foto dalam artikel ini menggunakan foto pin korpri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki arti sebagai pelindung dan pengayom negara.

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai Pelanggaran netralitas ASN mulai meningkat menjelang Pemilu 2024 setelah menekan perjanjian kerja sama antara KASN dan Bawaslu, lalu data 2022 terdapat 15 ASN yang melanggar netralitas yang mengarah kepada kontestasi politik 2024 dan angka ini terus meningkat pada tahun

2023. Kutipan langsung yang diberikan oleh Agus Pramusinto sebagai Ketua KASN menambah informasi mengenai pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Artikel ini ditutup dengan kutipan Agus Pramusinto yang menyatakan netralitas sering terjadi dan tentu tidak ingin terjadi, hal ini dikarenakan politik praktis ASN terjadi friksi.

## 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* menjelaskan Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara meningkat menjelang pemilu 2024 dan masa sebelum kampanye dinilai paling rawan. Unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu pada tanggal 31 Januari 2024 di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Unsur *why* menjelaskan pelanggaran netralitas ASN terjadi karena munculnya politik balas budi dan politik balas dendam dalam Pemilu 2024. Sedangkan unsur *how* menjelaskan Ketua Kasn melakukan kerja sama dengan Bawaslu dengan melakukan 5 butir kesepakatan salah satunya pertukaran data dan informasi. Kedua belah pihak sepakat membuat Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN (Siapnet).

## 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu paragraf pertama menjelaskan tren pelanggaran netralitas mulai meningkat menjelang pemilu 2024 dan diprediksi akan terus bertambah. Paragraf selanjutnya menjelaskan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh KASN dan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran netralitas. Sedangkan di paragraf akhir menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pelanggaran.

## 4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris dalam artikel berita ini terdapat penggunaan frasa “friksi” yang memiliki dua makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat dan perpecahan. Hal ini dapat disambungkan dengan adanya pelanggaran ASN yang berpihak kepada salah satu pasangan calon. Foto dalam artikel ini

menggunakan foto pin korpri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki arti sebagai pelindung dan pengayom negara.

#### 4.2.2 Analisis Framing Berita Republika Online

##### A. Analisis Artikel Berita 1 Republika Online

**Judul** : Kemenag : ASN Jaga Kerukunan Di Tahun Politik Jelang Pemilu 2024.

**Sumber** : Republika Online

**Tanggal** : 6, September 2023

**Ringkasan** : Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Utra (Sulut) Sarbin Sehe memberikan pernyataan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap netral dan jaga kerukunan di tahun politik 2024.

Tabel 4.11. Analisis Artikel Berita 1 Republika Online

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Kemenag : ASN Jaga Kerukunan Di Tahun Politik Jelang Pemilu 2024
	Lead	Sarbin Sehe selaku Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Utara mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral dan menjaga kerukunan di tahun politik khususnya pada pemilu 2024.
	Latar Informasi	Sarbin Sehe memberikan peringatan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara untuk netral dan menjaga sikap dalam menghadapi pemilu 2024 guna menjaga perpecahan dan konflik akibat adanya perbedaan pilihan politik serta menjaga kerukunan.
	Sumber	Sarbin Sehe (Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara) dan Muhammad Amin (Kepala Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)
	Kutipan	1. “Kami mengimbau bagi seluruh ASN Kemenag untuk netral dan menjaga sikap dalam menghadapi pemilu 2024.”

2. "Kita harus tetap menjaga persatuan dan menghormati perbedaan pendapat dalam suasana politik. Jangan sampai perbedaan pilihan politik mengoyak tali persaudaraan yang sudah terjalin dengan sangat baik."

3. "Kendati begitu, siapa pun harus memahami jika situasi ini harus terus dipelihara agar pemilu tetap dapat berjalan dengan kondusif di Jawa Tengah."

Pernyataan Opini

Dalam artikel berita ini terdapat pernyataan opini dari Sarbin Sehe yaitu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) harus menjadi teladan dalam bersikap netral dan menjaga suasana yang rukun dan damai.

Penutup

Artikel berita ini ditutup dengan kutipan yang diberikan oleh Muhammad Amin selaku Kepala Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yaitu setiap orang di Jawa Tengah harus memahami dan memelihara situasi selama pemilu dengan kondusif.

---

**Struktur Skrip**

What

Kementerian Agama (Kemenag) memperingati Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral dan menjaga kerukunan di tahun politik menjelang pemilu 2024.

Where

Manado dan Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Jawa Tengah.

When

6, September 2023

Who

Sabrin Sehe (Kepala Kanwil Kemenag Sulut) dan Muhammad Amin (Kepala Bawaslu Jawa Tengah).

Why

Pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap bijak dan netral menjelang pemilu 2024 agar terhindar dari perpecahan dan konflik akibat perbedaan pandangan politik pada pemilu 2024.

How

Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh membuat atau menyebarkan informasi yang berisi fitnah dan kebencian khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini untuk menciptakan

---

suasana yang rukun dan damai selama pemilu 2024.

---

<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Pada paragraf pertama menjelaskan tentang peringatan menjaga netralitas di lingkungan Kementerian Agama, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama, karna seharusnya para ASN di Kemenag menjadi teladan bagi seluruh ASN di Indonesia. Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang pentingnya bersikap bijak dalam menggunakan sosial media dengan cara tidak membuat status-status berisi fitnah dan kebencian. Paragraf terakhir menjelaskan tentang isu strategis kerawanan pemilu menurut data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan ditutup dengan pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yaitu Muhammad Amin.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Terdapat penggunaan frasa “fitnah dan kebencian” yang memiliki arti tuduhan tanpa dasar kebenaran untuk menjatuhkan orang lain, kata tersebut dapat dikaitkan dengan sikap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perbedaan politik yang dimana tidak boleh melakukan fitnah untuk menjatuhkan pilihan orang lain. Foto dalam artikel berita ini menggunakan foto kampanye Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral selama pemilu 2024.

---

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai peringatan yang diberika oleh Kementerian Agama (Kemenag) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga kerukunan di tahun politik jelang pemilu 2024. Pada *lead* berita ini yaitu Sarbin Sehe selaku Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Utara mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral dan menjaga kerukunan di tahun politik khususnya pada pemilu 2024. *Lead* pada aartikel ini memberikan penegasan latar

informasi. Latar informasi dari artikel berita ini yaitu Sarbin Sehe memberikan peringatan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara untuk netral dan menjaga sikap dalam menghadapi pemilu 2024 guna menjaga perpecahan dan konflik akibat adanya perbedaan pilihan politik serta menjaga kerukunan. Pada artikel berita ini menggunakan kutipan sumber dari Sarbin Sehe (Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara) dan Muhammad Amin (Kepala Bawaslu Provinsi Jawa Tengah). Pada pernyataan opini dari Sarbin Sehe menjelaskan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) harus menjadi teladan dalam bersikap netral dan menjaga suasana yang rukun dan damai. Artikel ini ditutup dengan kutipan yang diberikan oleh Muhammad Amin selaku Kepala Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yaitu setiap orang di Jawa Tengah harus memahami dan memelihara situasi selama pemilu dengan kondusif.

## 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* yaitu Kementerian Agama (Kemenag) memperingati Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral dan menjaga kerukunan di tahun politik menjelang pemilu 2024. Unsur *where* dan *when* yaitu Manado dan Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Jawa Tengah dan 6 September 2023. Unsur *who* melibatkan Sarbin Sehe (Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Utara) dan Muhammad Amin (Kepala Bawaslu Jawa Tengah). Kemudian unsur *why* pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap bijak dan netral menjelang pemilu 2024 agar terhindar dari perpecahan dan konflik akibat perbedaan pandangan politik pada pemilu 2024. Lalu unsur *how* yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh membuat atau menyebarkan informasi yang berisi fitnah dan kebencian khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini untuk menciptakan suasana yang rukun dan damai selama pemilu 2024.

## 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu paragraf pertama menjelaskan tentang peringatan menjaga netralitas di lingkungan

Kementerian Agama, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama, karna seharusnya para ASN di Kemenag menjadi teladan bagi seluruh ASN di Indonesia. Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang pentingnya bersikap bijak dalam menggunakan sosial media dengan cara tidak membuat status-status berisi fitnah dan kebencian. Paragraf terakhir menjelaskan tentang isu strategis kerawanan pemilu menurut data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan ditutup dengan pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yaitu Muhammad Amin.

#### 4. Struktur Retoris



Gambar 4.4. Artikel Berita 1 Republika Online

Pada struktur retorik dalam artikel berita ini terdapat penggunaan frasa “fitnah dan kebencian” yang memiliki arti tuduhan tanpa dasar kebenaran untuk menjatuhkan orang lain, kata tersebut dapat dikaitkan dengan sikap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perbedaan politik yang dimana tidak boleh melakukan fitnah untuk menjatuhkan pilihan orang lain. Foto dalam artikel berita ini menggunakan foto kampanye Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral selama pemilu 2024.

#### B. Analisis Artikel Berita 2 Republika Online

**Judul** : Bawaslu DIY Ajak Masyarakat Awasi Netralitas ASN di Medsos.

**Sumber** : Republika Online

**Tanggal** : 26, September 2023

**Ringkasan** : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta turut mengajak masyarakat di Provinsi ini untuk berpartisipasi aktif mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri di media sosial pada pemilu 2024.

Tabel 4.12. Analisis Artikel Berita 2 Republika Online

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Bawaslu DIY Ajak Masyarakat Awasi Netralitas ASN di Medsos.
	Lead	Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat di provinsi berpartisipasi aktif untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri di media sosial pada pemilu 2024.
	Latar Informasi	Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan politik telah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
	Sumber Kutipan	Sutrisnowati (Ketua Bawaslu DIY). 1. "Kami mengajak masyarakat ikut mengawasi ASN yang memperlihatkan preferensi politiknya di media sosial pribadi mereka." 2. "Memberikan 'like', 'comment' atau 'share' unggahan yang mendukung salah satu calon, termasuk melanggar netralitas," 3. "Tidak mungkin kalau kami melakukan pengawasan sendirian terhadap satu per satu akun medsos ASN,
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Artikel berita ini ditutup dengan pernyataan dari Ketua Bawaslu DIY, Sutrisnowati menyatakan bahwa segala tindakan sehari-hari ASN tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan partai politik tertentu. Bahkan ASN tidak boleh menghadiri kampanye meskipun tanpa menggunakan seragam.
Struktur Skrip	What	Masyarakat DIY diajak untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial.

	Where	Daerah Istimewa Yogyakarta.
	When	26, September 2023
	Who	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sutrisnowati (Ketua Bawaslu DIY).
	Why	Larangan ASN berpolitik telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
	How	Bawaslu DIY siap menerima aduan masyarakat jika menemukan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dari kepentingan politik praktis termasuk di media sosial.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Artikel berita ini dari awal hingga akhir menjealskan mengenai larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan politik praktis di media sosial, serta ajakan untuk masyarakat dalam mengawasi media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Istimewa Yogyakarta.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Foto dalam artikel berita ini menggunakan gambar ilustrasi dua orang wanita dengan menggunakan seragam berwarna coklat yang dapat diartikan sebagai warna seragam Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tumpukan kertas yang di tandatangan.

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai ajakan Bawaslu terhadap masyarakat untuk mengawasi media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN), di tekankan pada judul “Bawaslu DIY Ajak Masyarakat Awasi Netralitas ASN di Medsos”. Pada *lead* artikel berita ini yaitu Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat di provinsi berpartisipasi aktif untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri di media sosial pada pemilu 2024. Latar Informasi pada berita ini yaitu larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan politik telah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kutipan sumber hanya dari

Sutrisnowati selaku Ketua Bawaslu DIY. Tidak terdapat pernyataan opini, berita ini lebih fokus pada ajakan Bawaslu untuk memperhatikan media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) serta larangan netralitas ASN yang tercatat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Artikel ini ditutup dengan pernyataan Ketua Bawaslu DIY, Sutrisnowati menyatakan bahwa segala tindakan sehari-hari ASN tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan partai politik tertentu. Bahkan ASN tidak boleh menghadiri kampanye meskipun tanpa menggunakan seragam.

**2. Struktur Skrip**

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* yaitu masyarakat DIY diajak untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial. Unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 September 2023. Unsur *who* yaitu Sutrisnowati selaku Ketua Bawaslu DIY. Kemudian unsur *why* menjelaskan larangan ASN berpolitik telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Lalu *how* yaitu Bawaslu DIY siap menerima aduan masyarakat jika menemukan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dari kepentingan politik praktis termasuk di media sosial.

**3. Struktur Tematik**

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu artikel berita ini dari awal hingga akhir menjealskan mengenai larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan politik praktis di media sosial, serta ajakan untuk masyarakat dalam mengawasi media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Istimewa Yogyakarta.

**4. Struktur Retoris**

Pada struktur retoris dalam artikel berita ini adalah foto dalam artikel berita ini menggunakan gambar ilustrasi dua orang wanita dengan menggunakan seragam berwarna coklat yang dapat diartikan sebagai warna seragam Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tumpukan kertas yang di tandatangan.

### C. Analisis Artikel Berita 3 Republika Online

**Judul** : Wapres Maruf Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024.

**Sumber** : Republika Online

**Tanggal** : 31, Oktober 2023

**Ringkasan** : Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Tabel 4.13. Analisis Artikel Berita 3 Republika Online

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Wapres Maruf Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024.
	Lead	Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
	Latar Informasi	Selain netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pemilu yang akan berdampak terjadinya konflik di masyarakat.
	Sumber	Joko Widodo (Presiden RI) dan Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI).
	Kutipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral,".</li> <li>2. "Tentu, saya sebagai wakil presiden menyuarakan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur,".</li> <li>3. "Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat, hati-hati, bapak-ibu dilihat. Mudah sekali, kelihatan bapak-ibu memihak atau <i>ndak</i>. Krik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,".</li> <li>4. "Menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik, selesaikan dengan baik,".</li> </ol>
	Pernyataan Opini	-

	Penutup	Artikel berita ini ditutup dengan kutipan dari Presiden RI yaitu Joko Widodo, ia memberi peringatan untuk menjaga kerukunan di tingkat bawah dan berharap untuk segera selesaikan percikan-percikan yang memiliki keterkaitan dengan politik.
<b>Struktur Skrip</b>	<p>What</p> <p>Where</p> <p>When</p> <p>Who</p> <p>Why</p> <p>How</p>	<p>Wakil Presiden RI yaitu Ma'ruf Amin memberi peringatan tegas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral pada pemilu 2024.</p> <p>Jakarta.</p> <p>31, Oktober 2023</p> <p>Joko Widodo (Presiden RI) dan Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI).</p> <p>Peringatan tegas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bersikap netral selama pemilu 2024.</p> <p>Wakil Presiden RI yaitu Ma'ruf Amin menghimbau untuk seluruh pihak yang berkaitan dengan pemilu dan masyarakat untuk saling berkerjasama untuk mendukung jalanya pemilu yang damai, jujur, dan adil agar hasil yang diperoleh akan membawa kedamaian bagi bangsa Indonesia.</p>
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Artikel berita ini dari awal hingga akhir hanya fokus terhadap peringatan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI untuk tetap bersikap netral selama pemilu 2024 dimulai.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Terdapat kata “krik” yang diucapkan oleh Presiden RI yaitu Joko Widodo, kata tersebut dapat diartikan sebagai gambaran kondisi atau suasana yang tidak lucu. Kata tersebut dapat disambungkan dengan tidak lucunya para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak boleh bersikap tidak netral pada masa pemilu. Foto yang digunakan dalam artikel berita ini adalah foto Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI yang sedang melakukan pidato.

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai peringatan yang diberikan oleh Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral selama pemilu berlangsung. Pada *lead* yaitu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pada latar informasi menjelaskan selain netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pemilu yang akan berdampak terjadinya konflik di masyarakat. Kutipan sumber yang digunakan dari Joko Widodo selaku Presiden RI dan Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI. Tidak terdapat pernyataan opini dalam artikel berita ini, karena artikel berita ini hanya berfokus terhadap larangan ASN dalam bersikap tidak netral. Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Joko Widodo selaku Presiden RI yang menyatakan memberi peringatan untuk menjaga kerukunan di tingkat bawah dan berharap untuk segera selesaikan percikan-percikan yang memiliki keterkaitan dengan politik.

### 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W + 1H. Pada unsur *what* yaitu Wakil Presiden RI yaitu Ma'ruf Amin memberi peringatan tegas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral pada pemilu 2024. Unsur *where* dan *when* menjealskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023. Kemudian unsur *why* menjelaskan peringatan tegas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bersikap netral selama pemilu 2024. Lalu, unsur *how* menjelaskan Wakil Presiden RI yaitu Ma'ruf Amin menghimbau untuk seluruh pihak yang berkaitan dengan pemilu dan masyarakat untuk saling berkerjasama untuk mendukung jalanya pemilu yang damai, jujur, dan adil agar hasil yang diperoleh akan membawa kedamaian bagi bangsa Indonesia.

### 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu artikel berita ini dari

awal hingga akhir hanya fokus terhadap peringatan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI untuk tetap bersikap netral selama pemilu 2024 dimulai.

#### 4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris dalam artikel berita ini terdapat kata “krik” yang diucapkan oleh Presiden RI yaitu Joko Widodo, kata tersebut dapat diartikan sebagai gambaran kondisi atau suasana yang tidak lucu. Kata tersebut dapat disambungkan dengan tidak lucunya para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak boleh bersikap tidak netral pada masa pemilu. Foto yang digunakan dalam artikel berita ini adalah foto Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI yang sedang melakukan pidato.

#### D. Analisis Artikel Berita 4 Republika Online

**Judul** : Pemprov Jatim Tegaskan Netralitas ASN Pada Pemilu 2024.

**Sumber** : Republika Online

**Tanggal** : 1, November 2023

**Ringkasan** : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa pihaknya akan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Timur pada Pemilu 2024.

Tabel 4.14. Analisis Artikel Berita 4 Republika Online

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Adhy Karyono selaku Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur menegaskan pihaknya akan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Timur (Jatim) pada pemilu 2024.
	Lead	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.

Latar Informasi	Dalam aturan, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diamanatkan untuk tidak boleh berpihak dalam segala jenis bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, khususnya kepentingan pemerintah untuk tujuan politik.
Sumber	Adhy Karyono (Sekda Provinsi Jawa Timur) dan Mayjen TNI Farid Makruf (Pangdam V Brawijaya).
Kutipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas nama gubernur dan seluruh ASN juga menyatakan bahwa kami sepakat akan menjaga dan menjalankan prinsip netralitas ASN,”.</li> <li>2. “Kami juga sepakat akan menjaga seluruh fasilitas, sarana prasarana, untuk tidak digunakan pihak tertentu dalam kontestasi politik,”.</li> <li>3. “Ini bagian dari kami untuk bisa memfasilitasi seluruh elemen baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu,”.</li> <li>4. Saya memang diberikan tanggung jawab oleh Bu Gubernur untuk menjaga jalannya proses pemilu yang damai. Maka mari bersama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan itu,”.</li> </ol>
Pernyataan Opini	Dalam artikel berita ini terdapat opini dari Adhy Karyono yang menyampaikan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi Pemilu 2024 yang dimana Pemerintah Provinsi telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 1,080 triliun untuk mengawal jalanya pemilu yang kondusif, aman, jujur, dan adil. Serta opini dari Mayjen TNI Farid Makruf yaitu upaya dalam menciptakan keadaan kondusivitas dan pemilu damai di Jawa Timur tentunya tugas dan tanggung jawab bersama, lalu ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan selama pemilu 2024.

	Penutup	Artikel berita ini ditutup dengan kutipan Mayjen Tni Farid Makruf yaitu diberikan tugas tanggung jawab oleh Gubernur Jawa Timur untuk menjaga jalanya Pemilu 2024.
<b>Struktur Skrip</b>	What	Pemerintah Jawa Timur tegaskan netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2024.
	Where	Makodam V Brawijaya, Surabaya.
	When	1, November 2023.
	Who	Adhy Karyono (Sekda Jawa Timur) dan Mayjen TNI Farid Makruf (Pangdam V Brawijaya).
	Why	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan untuk tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik, serta diamanatkan untuk tidak berpihak dengan salah satu pasangan calon.
	How	Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran Rp 1,080 triliun untuk menjaga keadaan kondusif selama pemilu.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Secara keseluruhan artikel berita ini berfokus menyampaikan peringatan untuk Aparatur Sipil Negara khususnya Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,080 trilion untuk menjaga keadaan yang kondusif selamat pemilu.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Dalam artikel berita ini menampilkan gambar dari ilustrasi dua orang Aparatur Sipil Negara dengan membawa sebuah kardus, terlihat dari gambar tersebut , kedua Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan seragam dinas berwarna coklat.

*(Sumber: Olahan Peneliti)*

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur menegaskan pihaknya akan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Timur (Jatim) pada pemilu 2024. Pada yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik. Pada latar informasi menjelaskan aturan, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diamanatkan untuk tidak boleh berpihak dalam segala jenis bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, khususnya kepentingan pemerintah untuk tujuan politik. Kutipan sumber yang digunakan yaitu dari Adhy Karyono selaku Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan Mayjen TNI Farid Makruf selaku Pangdam V Brawijaya. Terdapat pernyataan opini pada artikel berita ini yaitu Adhy Karyono yang menyampaikan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi Pemilu 2024 yang dimana Pemerintah Provinsi telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 1,080 triliun untuk mengawal jalannya pemilu yang kondusif, aman, jujur, dan adil. Serta opini dari Mayjen TNI Farid Makruf yaitu upaya dalam menciptakan keadaan kondusivitas dan pemilu damai di Jawa Timur tentunya tugas dan tanggung jawab bersama, lalu ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan selama pemilu 2024.

## **2. Struktur Skrip**

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* Pemerintah Jawa Timur tegaskan netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2024. Unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu Makodam V Brawijaya, Surabaya pada tanggal 1 November 2023. Unsur *who* yaitu Adhy Karyono (Sekda Jawa Timur) dan Mayjen TNI Farid Makruf (Pangdam V Brawijaya). Unsur *why* menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan untuk tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik, serta diamanatkan untuk tidak berpihak dengan salah satu pasangan calon. Lalu pada unsur *how* menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggarana Rp 1,080 triliun untuk menjaga keadaan kondusif selama pemilu.

## **3. Struktur Tematik**

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu penulis menyampaikan

peringatan untuk Aparatur Sipil Negara khususnya Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,080 triliun untuk menjaga keadaan yang kondusif selamat pemilu. Secara keseluruhan penulis telah menyampaikan informasi dengan objektif.

#### 4. Struktur Retoris

Pada struktur retorik dalam artikel berita ini menampilkan gambar dari ilustrasi dua orang Aparatur Sipil Negara dengan membawa sebuah kardus, terlihat dari gambar tersebut, kedua Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan seragam dinas berwarna coklat.

#### E. Analisis Artikel Berita 5 Republika Online

**Judul** : Masa Pemilu, PJ Wali Kota Sukabumi Ingatkan Netralitas ASN dan Larangan Pose Jari.

**Sumber** : Republika Online.

**Tanggal** : 5, Desember 2023.

**Ringkasan** : Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat diingatkan untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024.

Tabel 4.15. Analisis Artikel Berita 5 Republika Online

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Masa Pemilu, PJ Wali Kota Sukabumi Ingatkan Netralitas ASN dan Larangan Pose Jari.
	Lead	Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat memberi peringatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berfoto. Tidak boleh menggunakan sepuluh jari untuk pose atau gaya, karena hal tersebut dapat mengisyaratkan dukungan terhadap nomor pasangan calon pemilu 2024.
	Latar Informasi	Tidak menunjukkan sikap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang yang berlaku, serta harus benar-benar netral

	<p>Sumber Kutipan</p> <p>Pernyataan Opini</p> <p>Penutup</p>	<p>dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu tertentu.</p> <p>Kusmana Hartadji (Walikota Sukabumi).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Korpri harus netral dan tidak boleh ada afiliasi terbuka kepada parpol tertentu dan tidak diskriminasi,”</li> <li>2. “Sebagai bagian aparatur negara membantu sesuai dengan kewenangan menyukseskan pemilu, mengajak warga menggunakan hak pilihnya,”</li> <li>3. “Anggota Korpri sebagai aparatur pemerintah jadi panutan, contoh di luar Korpri,”</li> </ol> <p>-</p> <p>Artikel berita ini ditutup dengan permintaan Kusmana Hartadji selaku Walikota Sukabumi untuk menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan keahlian dalam bekerja.</p>
<p><b>Struktur Skrip</b></p>	<p>What</p> <p>Where</p> <p>When</p> <p>Who</p> <p>Why</p> <p>How</p>	<p>Peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan pose foto.</p> <p>Kantor Gubernur Jawa Barat.</p> <p>5, Desember 2023.</p> <p>Kusmana Hartadji (Walikota Sukabumi).</p> <p>Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan foto dengan pose sepuluh jari dilarang selama pemilu 2024, karena tidak boleh ada afiliasi terbuka kepada partai politik dan tindak diskriminasi.</p> <p>Walikota Sukabumi berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalisme selama pemilu 2024 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyalurkan hak suara.</p>
<p><b>Struktur Tematik</b></p>	<p>Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.</p>	<p>Secara keseluruhan artikel berita ini menjelaskan peringatan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kota Sukabumi dengan tidak melakukan pose foto menggunakan sepuluh jari.</p>

<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Terdapat frasa “tidak boleh ada afiliasi terbuka kepada parpol” frasa ini menekankan untuk dilarangnya mendukung partai politik selama proses pemilu 2024 dengan melakukan pose foto menggunakan sepuluh jari. Foto yang digunakan dalam artikel berita ini yaitu Walikota Sukabumi yang sedang memimpin upacara pada saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi.
-------------------------	-----------------------------	--

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat memberi peringatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berfoto. Tidak boleh menggunakan sepuluh jari untuk pose atau gaya, karena hal tersebut dapat mengisyaratkan dukungan terhadap nomor pasangan calon pemilu 2024.

Latar informasi dalam artikel berita ini adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) harus benar-benar netral dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu tertentu. Terdapat kutipan sumber oleh Kusmana Hartadji selaku Walikota Sukabumi. Tidak terdapat pernyataan opini dalam artikel berita ini, karena fokus pembahasan hanya mengingatkan ASN dalam menjaga netralitas selama pemilu 2024. Artikel ini ditutup dengan permintaan Kusmana Hartadji selaku Walikota Sukabumi untuk menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan keahlian dalam bekerja.

### 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W + 1H. Pada unsur *what* Peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan pose foto.. Unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu Gedung Juang 45, Kota Sukabumi pada tanggal 5 Desember 2023. Pada unsur *who* yaitu Kusmana Hartadji selaku Walikota

Sukabumi. Unsur *why* menjelaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan foto dengan pose sepuluh jari dilarang selama pemilu 2024, karena tidak boleh ada afiliasi terbuka kepada partai politik dan tindak diskriminasi. Sedangkan unsur *how* menjelaskan Walikota Sukabumi berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalisme selama pemilu 2024 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyalurkan hak suara.

### 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu secara keseluruhan artikel berita ini menjelaskan peringatan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kota Sukabumi dengan tidak melakukan pose foto menggunakan sepuluh jari.

### 4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris dalam artikel berita ini adalah terdapat frasa “tidak boleh ada afiliasi terbuka kepada parpol” frasa ini menekankan untuk dilarangnya mendukung partai politik selama proses pemilu 2024 dengan melakukan pose foto menggunakan sepuluh jari. Foto yang digunakan dalam artikel berita ini yaitu Walikota Sukabumi yang sedang memimpin upacara pada saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi.

## F. Analisis Artikel Berita 6 Republika Online

**Judul** : Jelang Pemilu 2024, Komisi II Ingatkan Netralitas ASN.

**Sumber** : Republika Online.

**Tanggal** : 11, Desember 2023.

**Ringkasan** : Jelang Pemilu 2024, Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menekankan kurang lebih 50 persen Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota) diganti dengan pejabat struktural Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tabel 4.16. Analisis Artikel Berita 6 Republika Online

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Jelang Pemilu 2024, Komisi II DPR RI ingatkan netralitas ASN.
	Lead	Wakil Ketua Komisi II DPR RI menekankan bahwasanya kurang lebih 50 persen Kepala Daerah telah diganti dengan pejabat struktural Aparatur Sipil Negara (ASN).
	Latar Informasi	Terdapat potensi terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) karena masa jabatan Kepala Daerah sesudah pemilu 2024 akan lebih panjang dibanding masa jabatan Kepala Daerah sebelum Pemilu sebelumnya.
	Sumber Kutipan	Saan Mustopa (Wakil Komisi II DPR RI) 1. "Namun, ketika netralitas ASN terganggu, hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya polarisasi politik tentunya dapat merusak institusi demokrasi dengan menghambat proses pembuatan kebijakan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi. Hal tersebut tentu memicu penyalahgunaan sumber daya publik, risiko manipulasi dalam pemilihan umum, pengurangan kepercayaan publik, dan meningkatnya politisasi birokrasi," 2. "Ada yang hanya peringatan ringan, ada penurunan jabatan, dan ada penundaan kenaikan pangkat,"
	Pernyataan Opini	Terdapat pernyataan opini dari Politikus Partai Nasdem yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 5 huruf n menyebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang memberikan dukungan kepada calon tertentu, larangan tersebut disertai dengan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Lalu pernyataan selanjutnya dari Saan Mustopa selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menyampaikan pelanggaran

netralitas dapat merusak citra dan kepercayaan publik dan Saan Mustopa mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk partai politik, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan media untuk membantu menjaga proses pemilu dengan baik.

Penutup

Artikel berita ini ditutup dengan pelanggaran netralitas dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap birokrasi Pemerintah.

<b>Struktur Skrip</b>	What	Komisi II DPR RI menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap bersikap netral selama Pemilu 2024.
	Where	Kantor Gubernur Jawa Barat.
	When	11, Desember 2023.
	Who	Saan Mustopa dan Politikus Partai Nasdem.
	Why	Potensi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebabkan masa jabatan setelah Pemilu 2024 lebih panjang dibandingkan masa jabatan sebelum Pemilu 2024.
	How	Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk partai politik, lembaga pemerintah organisasi masyarakat, dan media untuk menjaga proses pemilu 2024 agar berjalan dengan baik.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Secara keseluruhan artikel berita ini menjelaskan peringatan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga netralitas selama pemilu 2024, serta membahas mengenai akibat dari pelanggaran netralitas yang akan memberikan citra buruk dan kepercayaan publik menurut terhadap birokrasi pemerintah. Penulis juga memasukan informasi terkait masa jabatan Kepala Daerah yang baru setelah pemilu 2024.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Penggunaan kata “Polarisasi Politik” ini digunakan untuk menekankan dan menegaskan peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga netralitas karena polarisasi ini merupakan kondisi yang menyebabkan opini, sikap, dan pandangan

---

politik dalam masyarakat terpecah apalagi dengan ditambahnya polarisasi ini terjadi pada isus-isu ideologis pemerintahan, kebijakan publik, dan dukungan terhadap figur politik tertentu. Foto yang digunakan dalam artikel berita ini adalah foto Wakil Ketua Komisi DPR RI Saan Mustopa yang sedang diwawancarai.

---

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai Wakil Ketua Komisi II DPR RI menekankan bahwasanya kurang lebih 50 persen Kepala Daerah telah diganti dengan pejabat struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peringatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga netralitas selama proses pemilu 2024. Lalu latar informasi artikel berita ini membahas potensi terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) karena masa jabatan Kepala Daerah sesudah pemilu 2024 akan lebih panjang dibanding masa jabatan Kepala Daerah sebelum Pemilu sebelumnya. Terdapat kutipan sumber oleh Saan Mustopo selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang menegaskan dampak jika terjadinya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Artikel berita ini ditutup dengan pelanggaran netralitas dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap birokrasi Pemerintah.

### 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* menjelaskan Komisi II DPR RI menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap bersikap netral selama Pemilu 2024. Unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu Kantor Gubernur Jawa Barat pada tanggal 11 Desember 2023. Pada unsur *who* yaitu Saan Mustopa selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan Politikus Partai Nasdem. Unsur *why* menjelaskan potensi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebabkan masa jabatan setelah Pemilu 2024 lebih panjang dibandingkan masa jabatan sebelum Pemilu 2024.

Sedangkan unsur *how* menjelaskan Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk partai politik, lembaga pemerintah organisasi masyarakat, dan media untuk menjaga proses pemilu 2024 agar berjalan dengan baik.

### 3. **Struktur Tematik**

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu secara keseluruhan artikel berita ini menjelaskan peringatan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga netralitas selama pemilu 2024, serta membahas mengenai akibat dari pelanggaran netralitas yang akan memberikan citra buruk dan kepercayaan publik menurut terhadap birokrasi pemerintah. Penulis juga memasukan informasi terkait masa jabatan Kepala Daerah yang baru setelah pemilu 2024.

### 4. **Struktur Retoris**

Pada struktur retoris dalam artikel berita ini adalah Penggunaan kata “Polarisasi Politik” ini digunakan untuk menekankan dan menegaskan peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga netralitas karena polarisasi ini merupakan kondisi yang menyebabkan opini, sikap, dan pandangan politik dalam masyarakat terpecah apalagi dengan ditambahnya polarisasi ini terjadi pada isu-isu ideologis pemerintahan, kebijakan publik, dan dukungan terhadap figur politik tertentu. Foto yang digunakan dalam artikel berita ini adalah foto Wakil Ketua Komisi DPR RI Saan Mustopa yang sedang diwawancarai.

## G. **Analisis Artikel Berita 7 Republika Online**

**Judul** : Buat Pakta Integritas, Bupati Sukabumi Wanti-Wanti Netralitas ASN.

**Sumber** : Republika Online

**Tanggal** : 18, Desember 2023

**Ringkasan** : Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Bara telah diingatkan untuk berkomitmen

menjaga netralitas dalam Pemilu 2024, bentuk komitmen yang dijalankan adalah dibuatnya pakta integritas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tabel 4.17. Analisis Artikel Berita 7 Republika Online

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksi</b>	Judul	Pakta Integritas, Bupati Sukabumi Wanti-Wanti Netralitas ASN.
	Lead	Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat membuat pakta integritas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat penandatanganan pakta integritas di sela-sela rapat dinas bulan Desember 2023.
	Latar Informasi	Penandatanganan pakta integritas dilakukan untuk menjaga netralitas seluruh ASN di Sukabumi, Jawa Barat.
	Sumber	Marwan Hamami (Bupati Sukabumi).
	Kutipan	1. “Ketidaknetralan ASN dapat berdampak negatif,” 2. “Di akhir tahun 2023 ini ASN harus siap siaga menghadapi cuaca ekstrem hingga awal tahun 2024,”
	Pernyataan Opini	Terdapat pernyataan opini dalam artikel berita ini yaitu menurut Marwan Hamami selaku Bupati Sukabumi, penurunan profesionalisme, konflik kepentingan, kesenjangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga diskriminasi layanan menyebabkan dampak negatif.
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan harapan Bupati Sukabumi untuk meminta fokus mengenai berbagai persoalan yang terjadi wilayah masing-masing, khususnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pemilu 2024.
<b>Struktur Skrip</b>	What	Bupati Sukabumi membuat pakta integritas untuk memberi peringatan ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sukabumi.
	Where	Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanrau, Jawa Barat.
	When	18, Desember 2023.
	Who	Marwan Hamami (Bupati Sukabumi).

	Why	Pakta integritas dibuat karena penurunan profesionalisme, konflik kepentingan, kesenjangan layanan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan diskriminasi layanan. Maka dari itu pakta integritas dibuat untuk selalu menjaga netralitas.
	How	-
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Secara keseluruhan artikel berita ini menjelaskan mengenai pembuatan pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sukabumi yang berguna untuk menjaga netralitas selama pemilu 2024 hingga peringatan untuk menjaga cuaca ekstrem hingga awal tahun 2024.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Terdapat penggunaan frasa “cuaca ekstrem tahun 2023 hingga awal tahun 2024”, frasa tersebut dapat diartikan juga dengan kondisi yang memanas selama masa kampanye pemilu 2024 dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai pembuatan pakta Integritas, Bupati Sukabumi Wanti-Wanti Netralitas ASN dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat membuat pakta integritas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat penandatanganan pakta integritas di sela-sela rapat dinas bulan Desember 2023. Kutipan sumber dalam artikel berita ini oleh Marwan Hamami selaku Bupati Sukabumi yang menyatakan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara akan berdampak negatif bagi masyarakat. Terdapat pernyataan opini dalam artikel berita ini yaitu menurut Marwan Hamimi selaku Bupati Sukabumi, penurunan profesionalisme, konflik kepentingan, kesenjangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga diskriminasi layanan menyebabkan dampak negatif. Artikel ini ditutup dengan harapan Bupati Sukabumi untuk meminta fokus mengenai berbagai persoalan yang terjadi wilayah masing-

masing, khususnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pemilu 2024.

## 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* penulis menjelaskan Bupati Sukabumi membuat pakta integritas untuk memberi peringatan ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sukabumi. Unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Jawa Barat pada tanggal 18 Desember 2023. Unsur *who* yaitu Marwan Hamami selaku Bupati Sukabumi. Unsur *why* menjelaskan pembuatan pakta integritas dibuat karena penurunan profesionalisme, konflik kepentingan, kesenjangan layanan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan diskriminasi layanan. Maka dari itu pakta integritas dibuat untuk selalu menjaga netralitas. Tidak terdapat unsur *how* karena teks berita tidak secara rinci menjelaskan dasar dalam pembuatan pakta integritas dan dampak positif pembuatan pakta integritas.

## 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu secara keseluruhan artikel berita ini menjelaskan mengenai pembuatan pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sukabumi yang berguna untuk menjaga netralitas selama pemilu 2024 hingga peringatan untuk menjaga cuaca ekstrem hingga awal tahun 2024.

## 4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris dalam artikel berita ini menjelaskan terdapat penggunaan frasa “cuaca ekstrem tahun 2023 hingga awal tahun 2024”, frasa tersebut dapat diartikan juga dengan kondisi yang memanas selama masa kampanye pemilu 2024 dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

## H. Analisis Artikel Berita 8 Republika Online

**Judul** : Keluarkan Maklumat, Sivitas Akademika UMJ Minta Presiden Tetap Jaga Nilai Moral dan Etika.

**Sumber** : Republika Online

**Tanggal** : 5, Januari 2024

**Ringkasan** : Sivitas akademika UMJ membacakan maklumat yang terdiri dari lima poin tentang nilai moral dan etika Presiden.

Tabel 4.18. Analisis Artikel Berita 8 Republika Online

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksi</b>	Judul	Keluarkan Maklumat, Sivitas Akademika UMJ Minta Presiden Tetap Jaga Nilai Moral dan Etika.
	Lead	Guru Besar dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta membacakan maklumat yang ditujukan untuk Presiden RI Joko Widodo.
	Latar Informasi	Sivitas akademika UMJ menyerukan maklumat dengan tujuan yang baik, karena ingin Pemilu 2024 damai dan tetap bersatu serta perbedaan pilihan tidak membuat perpecahan.
	Sumber	Prof.Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH (pakar hukum tata negara dan dosen Fakultas Hukum UMJ).
	Kutipan	1. “Kami menyerukan ini dengan tujuan baik. Kami ingin pemilu damai dan tetap bersatu serta perbedaan pilihan itu tidak menjadikan perpecahan. Kami hanya ingin praktik-praktik bernegara yang kali ini ada itu lurus sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang dijunjung tinggi,”
	Pernyataan Opini	-
	Penutup	Artikel berita ini ditutup dengan harapan Prof.Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH yaitu agar seluruh penyelenggara negara dapat memberikan kebebasan hak pilih dan menjaga netralitas selama proses pemilu 2024.

<b>Struktur Skrip</b>	What	Pembacaan maklumat oleh Sivitas Akademika UMJ terhadap nilai moral dan etika presiden pada masa Pemilu 2024.
	Where	Universita Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan.
	When	5, Januari 2024.
	Who	Sivitas Akademika UMJ dan Prof.Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH.selaku guru besar yang terikat sebagai ASN.
	Why	Pembacaan maklumat memiliki lima poin yaitu menuntur Presiden untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, menuntur pejabat negara, ASN, Polri, Kejaksaan, TNI untuk tidak menggunakan kuasa, sumber daya, dan pengaruh untuk melanggar prinsip netralitas. Menuntur penyelenggara pemilu untuk melindungi hak pilih setiap WNI dan menyerukan seluruh sivitas akademika seluruh indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan.
	How	-
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Secara keseluruhan artikel berita ini hanya menjelaskan point-point atau isi dari maklumat yang dibuat oleh sivitas akademika UMJ dan tidak ada penjelasan lain selain menjunjung tinggi prinsip netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Artikel berita ini menggunakan foto yaitu sivitas akademika UMJ yang sedang melakukan konfrensi pres dengan membacakan maklumat untuk Presiden Joko Widodo.

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai Guru Besar dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta membacakan maklumat yang ditujukan untuk Presiden RI Joko Widodo, serta Sivitas akademika UMJ menyerukan

maklumat dengan tujuan yang baik, karena ingin Pemilu 2024 damai dan tetap bersatu serta perbedaan pilihan tidak membuat perpecahan. Terdapat kutipan sumber oleh Prof.Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH (pakar hukum tata negara dan dosen Fakultas Hukum UMJ). Tidak terdapat pernyataan opini dalam artikel berita ini. Artikel ini ditutup dengan harapan Prof.Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH yaitu agar seluruh penyelenggara negara dapat memberikan kebebasan hak pilih dan menjaga netralitas selama proses pemilu 2024.

## 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* menjelaskan pembacaan maklumat oleh Sivitas Akademika UMJ terhadap nilai moral dan etika presiden pada masa Pemilu 2024. Unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan pada tanggal 5 Januari 2024. Unsur *who* yaitu Sivitas Akademika UMJ dan Prof.Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH selaku pakar hukum tata negara dan Dosen Fakultas Hukum UMJ. Unsur *why* menjelaskan pembacaan maklumat memiliki lima poin yaitu menuntur Presiden untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, menuntut pejabat negara, ASN, Polri, Kejaksaan, TNI untuk tidak menggunakan kuasa, sumber daya, dan pengaruh untuk melanggar prinsip netralitas. Menuntut penyelenggara pemilu untuk melindungi hak pilih setiap WNI dan menyerukan seluruh sivitas akademika seluruh indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan. Tidak terdapat unsur *how* pada artikel berita ini.

## 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu secara keseluruhan artikel berita ini hanya menjelaskan point-point atau isi dari maklumat yang dibuat oleh sivitas akademika UMJ dan tidak ada penjelasan lain selain menjunjung tinggi prinsip netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### 4. Struktur Retoris

Pada struktur retorisi dalam artikel berita ini menggunakan foto yaitu sivitas akademika UMJ yang sedang melakukan konferensi pers dengan membacakan maklumat untuk Presiden Joko Widodo.

##### I. Analisis Artikel Berita 9 Republika Online

**Judul** : Komisi X Ingatkan ASN Pendidik Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024.

**Sumber** : Republika Online

**Tanggal** : 11, Januari 2024

**Ringkasan** : Video oknum pendidik atau guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tasikmalaya yang secara terang-terang mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 4.19. Analisis Artikel Berita 9 Republika Online

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	Komisi X Ingatkan ASN Pendidik Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024.
	Lead	Beredarnya video oknum tenaga pendidik atau guru berstatus Aparatur Sipil Negara di Tasikmalaya mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara terbuka. Wakil Ketua Komisi X DPR RI memperingatkan agar Aparatur Sipil negara menjaga kode etik yang telah di tetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
	Latar Informasi	Seorang oknum guru yang terkonfirmasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di SDN Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat membuat video dukungan untuk salah satu paslon dengan durasi 4 menit 28 detik secara terang-terangan.
	Sumber	Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
	Kutipan	1. "ASN harus jaga netralitas, apalagi sebagai guru yang senantiasa digugu dan ditiru,

selayaknya memberi contoh yang baik secara hukum maupun etik,”

2. “ASN harusnya netral dan tetap menjaga netralitas serta kondusifitas pemilu, sehingga pelanggaran tersebut harus segera diberi sanksi yang memberi efek jera, dan agar tidak ditiru oleh ASN lainnya di manapun, terlebih kalangan pendidik,”

3. “Tunjukkan wajah demokrasi yang humanis, cerdas, beretika, dan menjunjung tinggi hukum. Caranya adalah menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi netralitas ASN, serta memberikan edukasi kepada publik cara-cara berdemokrasi yang baik, bukan malah menodainya,”

4. “Janganlah dunia pendidikan dijadikan korban kampanye pemilu yang tak mengindahkan aturan dengan benar,”

Pernyataan Opini -

Penutup

Artikel ini ditutup dengan ajakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana pendidikan yang kondusif demi masa depan generasi bangsa yang baik.

---

**Struktur Skrip**

What	Oknum tenaga pendidik atau guru berstatus Aparatur Sipil Negara mendukung salah satu paslon Pemilu 2024 dengan membuat video.
Where	Sekolah Dasar Negeri Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
When	Berita diterbitkan 11 Januari 2024 dan video oknum tenaga pendidik pada 6 Januari 2024.
Who	Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) dan Oknum guru SDN Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Why	Video dukungan terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibuat oleh oknum tenaga pendidikan atau guru SDN Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
How	Oknum tenaga pendidik tersebut membuat video berdurasi 4 menit 28 detik yang mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

---

<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Secara keseluruhan artikel berita ini menjelaskan video oknum guru yang mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI memberi peringatan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menjaga sikap netralitas sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Terdapat frasa “sektor pendidik harusnya memberi contoh terbaik dalam demokrasi” frasa ini menekankan tenaga didik sebagai contoh terbaik. “ASN dilarang melakukan kampanye dalam kontestasi politik” frasi ini menekankan ASN dilarang berpihak. “dirinya mengajak seluruh elemen pendidik menjaga suasana pendidikan” frasa ini menekankan ajakan Wakil Ketua Komisi DPR RI kepada tenaga didik untuk menjaga kondisi pendidikan yang kondusif. Foto dalam artikel berita ini menggunakan ilustrasi Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang sedang melakukan rapat.

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai beredarnya video oknum tenaga pendidik atau guru berstatus Aparatur Sipil Negara di Tasikmalaya mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara terbuka. Wakil Ketua Komisi X DPR RI memperingatkan agar Aparatur Sipil negara menjaga kode etik yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Latar informasi menjelaskan Seorang oknum guru yang terkonfirmasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di SDN Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat membuat video dukungan untuk salah satu paslon dengan durasi 4 menit 28 detik secara terang-terangan. Kutipan sumber dalam artikel berita ini adalah Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua Komisi X DPR RI). Tidak terdapat pernyataan opini dalam artikel berita ini karena hanya fokus

terhadap peringatan netralitas sektor pendidikan. Artikel ini ditutup dengan ajakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana pendidikan yang kondusif demi masa depan generasi bangsa yang baik.

## 2. Struktur Skrip

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* menjelaskan oknum tenaga pendidik atau guru berstatus Aparatur Sipil Negara mendukung salah satu paslon Pemilu 2024 dengan membuat video. Unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu Sekolah Dasar Negeri Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 11 Januari 2024 dan video oknum tenaga pendidik pada 6 Januari 2024. Unsur *why* menjelaskan video dukungan terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibuat oleh oknum tenaga pendidikan atau guru SDN Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Unsur *How* menjelaskan oknum tenaga pendidik tersebut membuat video berdurasi 4 menit 28 detik yang mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

## 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu secara keseluruhan artikel berita ini menjelaskan video oknum guru yang mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI memberi peringatan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menjaga sikap netralitas sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN.

## 4. Struktur Retoris

Pada struktur retoris dalam artikel berita ini yaitu terdapat frasa “sektor pendidik harusnya memberi contoh terbaik dalam demokrasi” frasa ini menekankan tenaga didik sebagai contoh terbaik. “ASN dilarang melakukan kampanye dalam kontestasi politik” frasi ini menekankan ASN dilarang berpihak. “dirinya mengajak seluruh elemen pendidik menjaga suasana pendidikan” frasa ini menekankan ajakan Wakil Ketua Komisi DPR RI kepada tenaga didik untuk menjaga kondisi pendidikan yang kondusif.

Foto dalam artikel berita ini menggunakan ilustrasi Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang sedang melakukan rapat.

## J. Analisis Artikel Berita 10 Republika Online

**Judul** : KASN Waswas Mobilisasi ASN di Pemilu 2024.  
**Sumber** : Republika Online  
**Tanggal** : 31, Januari 2024  
**Ringkasan** : Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) khawatir ada mobilisasi ASN karena capres tidak perlu mundur dari jabatannya.

Tabel 4.20. Analisis Artikel Berita 10 Republika Online

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksi	Judul	KASN Waswas Mobilisasi ASN di Pemilu 2024.
	Lead	Komisi Aparatur Sipil Negara merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan menteri maju sebagai calon presiden tanpa harus mundur dari jabatannya.
	Latar Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian yang tidak netral saat pemilu 2024 yang mendukung menteri yang nyapres akan dijatuhi sanksi.
	Sumber	Agus Pramusinto (Ketua KASN)
	Kutipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Saya kira pelanggaran (netralitas) ASN bisa terjadi di daerah maupun di pusat. Kemarin tahun 2021 atau 2022 di pusat juga ada pelanggaran ASN di level kementerian,"</li> <li>2. "Untuk menteri yang berasal dari partai ya kami melaporkannya kepada Presiden karena presiden yang mengangkat menteri. Kita serahkan kepada Presiden untuk mengambil tindakan,"</li> <li>3. "Penggunaan fasilitas negara itu harus dilihat. Ketika dia melakukan kampanye politik dan ketika dia sebagai menteri, itu harus dipisahkan,"</li> </ol>
	Pernyataan Opini	-

	Penutup	Artikel berita ini ditutup dengan perubahan bunyi Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, Pasal tersebut mewajibkan menteri untuk mengundurkan diri ketika maju atau nyalon sebagai Calon Presiden.
<b>Struktur Skrip</b>	What	Peringatan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maju sebagai Calon Presiden.
	Where	Kantor Bawaslu RI
	When	31, Januari 2024
	Who	Agus Pramusinto (Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ) dan Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI).
	Why	Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan menterei maju sebagai calon Presiden.
	How	Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian tidak netral saat Pemilu 2024 demi mendukung menteri yang maju sebagai calon Presiden.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proporsi kalimat, Hubungan antar kalimat.	Secara keseluruhan artikel berita ini menjelaskan peringatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian untuk menjaga sikap netral jika pejabatnya maju di Pemilu 2024.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Dalam artikel ini menampilkan gambar ketua KASN yaitu Agus Pramusinto yang sedang melakukan konferensi pers di Kantor Bawaslu RI.

(Sumber: Olahan Peneliti)

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel berita ini, penulis ingin menjelaskan mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan menteri maju sebagai calon presiden tanpa harus mundur dari jabatannya. Latar informasi artikel berita ini ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian yang tidak netral saat pemilu

2024 yang mendukung menteri yang nyapres akan dijatuhi sanksi. Terdapat kutipan sumber pada artikel berita ini dari Agus Pramusinto yang menyatakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat terjadi di daerah dan pusat. Artikel berita ini ditutup dengan perubahan bunyi Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, Pasal tersebut mewajibkan menteri untuk mengundurkan diri ketika maju atau nyalon sebagai Calon Presiden.

**2. Struktur Skrip**

Pada struktur skrip dalam artikel berita ini telah melengkapi unsur 5W +1H. Pada unsur *what* menjelaskan peringatan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maju sebagai Calon Presiden. Unsur *where* dan *when* menjelaskan lokasi kejadian dan waktu kejadian yaitu di kantor Bawaslu RI pada tanggal 31 Januari 2024. Unsur *who* yaitu Agus Pramusinto (Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ) dan Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI) yang memperingati netralitas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup Kementrian. Unsur *why* menjelaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan menterei maju sebagai calon Presiden. Unsur *how* menjelaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementrian tidak netral saat Pemilu 2024 demi mendukung menteri yang maju sebagai calon Presiden.

**3. Struktur Tematik**

Pada struktur tematik dalam artikel berita ini yaitu keseluruhan artikel berita ini menjelaskan peringatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementrian untuk menjaga sikap netral jika pejabatnya maju di Pemilu 2024.

**4. Struktur Retoris**

Pada struktur retoris dalam artikel berita ini menampilkan gambar ketua KASN yaitu Agus Pramusinto yang sedang melakukan konferensi pers di Kantor Bawaslu RI.

### 4.3 Hasil Analisis Framing Kompas.com dan Republika Online

Menurut hasil rangkuman artikel berita antara dua media nasional Kompas.com dan Republika Online yang membahas mengenai pelanggaran dan peringatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan Presiden atau Pemilu 2024. Peneliti menemukan pembingkai yang berusaha dibentuk oleh dua media nasional yakni Kompas.com dan Republika Online yang membahas mengenai pelanggaran dan peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberitaan yang dipublikasikan melalui situs Kompas.com lebih berfokus untuk membahas pelanggaran yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan presiden atau Pemilu. Kondisi tersebut dinyatakan dari inti seluruh berita dianalisis yang memberikan informasi itu. Pada struktur sintaksis berisi tentang bagaimana pelanggaran yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang banyak ditanggapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Anggota Partai Politik, Juru Bicara Tim Pemenang Ganjar dan Mahfud, Ketua Komisi Aparatur Negara (KASN), Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Direktur Jendral Kominfor, dan Pakar Hukum Tata Negara. Kondisi tersebut dikuatkan pada judul yang dipaparkan, sertapun narasumber yang dipergunakan telah membingkai permasalahan yang terjadi.

Narasumber yang ditetapkan oleh Kompas.com lebih dari satu dalam tiap-tiap beritanya, sebab Kompas.com dalam melangsungkan pemberitaan harus *cover both side* atau tidak pada satu sisi pemberitaan saja. Lalu, Kompas.com saat membuat *lead* lebih kredibel atau meyakinkan, karena *lead* dapat memberikan sebuah deskripsi secara ringkas dari isi berita sehingga pembaca mendapatkan visualisasi apa saja yang akan disajikan dalam isi berita Kompas.com. Kutipan sumber yang dibuat oleh Kompas.com tentunya cenderung mendukung informasi yang telah dipaparkan, sertapun tidak terdapat pernyataan opini dari penulis kecuali pada artikel berita nomor sembilan dan sepuluh. Isi pemberitaan dipaparkan dari pernyataan-pernyataan narasumber yang objektif serta *cover both side*. Kemudian penutup yang dicakup dalam berita Kompas.com yang lebih memfokuskan padapernyataan yang diungkapkan oleh narasumber.

Pada struktur retorika ataupun bagaimana cara penulis memfokuskan fakta pada semua artikel berita yang diterbitkan Kompas.com kerap ditemukan

penekanan kata terhadap pernyataan yang dilandaskan pada narasumber dengan mendeskripsikan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain dari itu, banyak juga penekanan informasi yang mampu membagikan pengaruh untuk para pembaca. Pada pemilihan gambar, Kompas.com dengan rasional dapat menyelaraskan dengan foto di artikel berita yang ingin diberitakan, sertapun keterangan gambar tersebut cukup jelas.

Lain halnya dengan hasil rangkuman penulis di artikel berita Republika Online, secara keseluruhan ditemukan sejumlah hal berkaitan dengan peringatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan Presiden atau Pemilu 2024. Peneliti menemukan peminangan artikel berita yang utama dari Republika Online yaitu bagaimana peristiwa peringatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam pemberitaan yaitu Kanwil Kementerian Agama, Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Sekertaris Daerah Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bupati Sukabumi, dan Sivitas Akademik UMJ terkait peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi tersebut dapat dilihat dari isi berita yang telah dikaji dengan banyak mempergunakan kata persuasif atau ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga, berkomitmen, dan mengawasi untuk menciptakan kondisi Pemilu terhindar dari pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

*Lead* yang ada pada artikel berita hanya mencakup topik peringatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat menjaga netralitas selama pemilu 2024. Hampir keseluruhan setiap pemberitaan pada media Republika Online hanya memuat satu narasumber yang sesuai dengan pemberitaan tersebut. Walaupun hanya menggunakan satu narasumber pada media Republika Online, tidak semua artikel berita terdapat pernyataan opini kecuali empat artikel berita yang terdapat pernyataan opini yaitu Kemenag Asn Jaga Kerukunan Di Tahun Politik Jelang Pemilu 2024, Pemprov Jatim Tegaskan Netralitas Asn Pada Pemilu 2024, Jelang Pemilu 2024 Komisi II Ingatkan Netralitas Asn, Buat Pakta Integritas Bupati Sukabumi Wanti-Wanti Netralitas Asn. Kemudian penutup artikel berita media Republika Online banyak menggunakan harapan narasumber tentang peringatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Dalam struktur retorik ataupun cara penulis dalam memfokuskan fakta pada semua artikel berita yang dibuat oleh media Republika Online seringkali menggunakan gambar animasi yang sesuai untuk menggambarkan isi artikel berita, serta dilengkapi penjelasan pada gambar animasi tersebut seperti dua orang Aparatur Sipil Negara dengan membawa sebuah kardus, terlihat dari gambar tersebut, kedua Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan seragam dinas berwarna coklat. Penelitian yang sedang dilakukan dari awal difokuskan agar menganalisis pembedaan artikel berita pada media Kompas.com serta Republika Online yang berkaitan dengan pemberitaan pelanggaran dan peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Menurut perolehan analisis antara Kompas.com serta Republika Online, kedua media online tersebut pastinya mempunyai cara serta sudut pandang yang berbeda saat membicarakan suatu kejadian yang sama di struktur sintaksis, skrip, tematik, serta retorik. Menyandingkan pembedaan kedua artikel berita media online tersebut mampu dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.21. Perbandingan Hasil Analisis Kompas.com dan Republika Online

Struktur	Kompas.com	Republika Online
<b>Struktur Sintaksis</b>	<p>Pemilihan kata untuk headline berita bernilai informatif dan tentunya sesuai dengan fokus pemberitaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p>Penulisan kutipan pada pernyataan yang diberikan secara keseluruhan memiliki keterkaitan dalam kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), ditambah dengan kutipan yang menambah informasi dalam keseluruhan berita.</p> <p>Penulisan penutup dalam keseluruhan artikel berita kerap menggunakan penegasan mengenai topik yang sedang dibahas.</p>	<p>Pemilihan frasa untuk headline berita lebih mudah untuk dipahami. <i>Lead</i> dalam berita sangat singkat atau <i>to the point</i> dan tidak ada penjelasan lebih mendalam terkait peringatan untuk netralitas ASN dalam Pemilu 2024.</p> <p>Secara keseluruhan pemberitaan berfokus pada ajakan atau persuasif terhadap seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam menjaga suasana Pemilu 2024 yang damai.</p> <p>Pada akhir pemberitaan ditutup dengan kutipan dari narasumber.</p>

<b>Struktur Skrip</b>	Seluruh artikel berita telah melengkapi unsur 5W + 1H, khususnya unsur <i>what</i> untuk membantu menjelaskan informasi yang terjadi dan bagaimana hal tersebut terjadi.	Pemberitaan sudah berisi 5W + 1H dan mengutamakan unsur <i>how</i> terkait tanggapan narasumber yang memperingati netralitas ASN selama Pemilu 2024.
<b>Struktur Tematik</b>	Secara keseluruhan, artikel berita dibuat berdasarkan tanggapan yang memiliki hubungan dengan kejadian atau peristiwa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN, serta melakukan penulisan fakta pada setiap artikel berita tentang pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	Secara keseluruhan, pemberitaan difokuskan pada tanggapan dan ajakan untuk menjaga sikap netralitas selama Pemilu 2024, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lembaga penyelenggara Pemilu.
<b>Struktur Retoris</b>	Terdapat banyak penekanan frasa " <i>abuse of power</i> ", "pelanggaran ASN", "netralitas ASN", dan "dugaan". Terdapat penekanan fakta yang akan memberikan pengaruh kepada para pembaca terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu atau Pilpres 2024. Foto yang digunakan merupakan foto kejadian yang sesuai dengan judul pemberitaan.	Terdapat banyak penegasan frasa "mengajak", "menjaga", "mengawasi", dan "netralitas" yang ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto yang digunakan memiliki hubungan dengan judul dan terdapat penggunaan gambar ilustrasi untuk menjaga sikap netralitas selama Pemilu 2024, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

(Sumber: Olahan Peneliti)

Berdasarkan tabel diatas yang didapat dari analisis terkait artikel berita media *online* Kompas.com secara menyeluruh ditemukan beberapa aspek pada pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Presiden atau Pemilihan Umum 2024 periode September 2023 hingga Januari 2024. Pada penelitian ini terdapat pemingkai yang diutamakan oleh media Kompas.com untuk membingkai berita yang informatif yaitu pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Presiden atau Pemilihan Umum 2024, lalu media Kompas.com berupaya untuk menambahkan kritikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di pelaksanaan Pemilihan Presiden atau Pemilihan Umum 2024 serta tentunya pemberitaan tetap objektif, *cover both side*, dan menyajikan pernyataan

dari pemerintah dan narasumber meski pernyataan tersebut terletak di *lead* dan latar informasi. Secara keseluruhan artikel berita Kompas.com memperhatikan kutipan-kutipan dari berbagai sumber.

Dalam struktur sintaksis, media Kompas.com mendapatkan informasi dengan berdasarkan peristiwa secara detail yaitu pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN di Pemilihan Presiden atau Pemilihan Umum 2024, lalu pernyataan dari berbagai sumber memperkuat *headline* artikel pemberitaan. Selain itu, terdapat kutipan sumber pada setiap artikel berita Kompas.com yang dianalisis, kutipan sumber tersebut menekankan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa Pemilihan Presiden atau Pemilihan Umum 2024, akan tetapi pemberitaan tersebut tetap objektif, *cover both side*, dan tetap menyajikan pernyataan dari pemerintah atau lembaga-lembaga penyelenggara Pemilihan Presiden atau Pemilihan Umum 2024, serta didasarkan dengan data-data statistik yang terdapat di beberapa artikel berita. Narasumber yang digunakan media Kompas.com yaitu anggota partai politik, Bawaslu, Tim Pemenang Paslon Ganjar dan Mahfud, Kasn, PPK, Dirjen Kominfo, dan Pakar hukum tata negara. Pada seluruh *headline* artikel Kompas.com memiliki sifat yang informatif dan lebih sering menggunakan kata pelanggaran. Seperti “Pelanggaran Netralitas ASN Marak, Komitmen Pemerintahan Jokowi Disorot”, yang menjelaskan informasi mengenai banyaknya pelanggaran yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa Pemerintahan Jokowi. Media Kompas.com menyajikan *lead* yang bertujuan untuk melengkapi judul artikel dengan menjelaskan keseluruhan informasi secara ringkas dan jelas, sehingga akan memudahkan pembaca untuk mengerti apa isi berita tersebut. Kompas.com kerap menggunakan kutipan untuk memperkuat informasi yang disampaikan oleh penulis dan beberapa artikel ditutup dengan penegasan mengenai topik yang sedang dibahas melalui kutipan.

Pada struktur skrip ataupun bagaimana cara penulis melakukan penggambaran suatu berita yaitu pemberitaan hampir memiliki persamaan pada struktur sintaksis yang menjelaskan bagaimana pernyataan-pernyataan beberapa sumber yang tentunya menanggapi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Presiden atau Pemilihan Umum 2024. Setiap artikel berita media Kompas.com sudah dilengkapi dengan unsur 5W + 1H, terutama unsur *what* terkait

informasi yang menjelaskan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden atau pun Pemilihan Umum 2024 yang dapat dikatakan sudah sesuai dengan *headline* berita. Unsur *what* dalam keseluruhan berita media Kompas.com lebih tegas dalam menjelaskan masalah yang terjadi yaitu pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden atau Pemilihan Umum 2024. Kemudian terdapat unsur tematik atau bagaimana cara penulis dalam menuliskan fakta di media Kompas.com, peneliti menemukan berita yang dipublikasikan mengandalkan kutipan dari narasumber yang terlibat pada pemberitaan. Peneliti juga berusaha untuk menyampaikan fakta yang berada di pemberitaan sebelumnya.

Struktur retorik yang menjelaskan bagaimana cara penulis dalam menyoroti fakta dalam sebuah pemberitaan yang akan di publikasikan. Secara keseluruhan isi dari pemberitaan tersebut diunggah oleh Kompas.com dengan pemilihan frasa secara terus-menerus yang menekankan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu 2024 dengan menggunakan frasa *abuse of power*, pelanggaran ASN, netralitas ASN, dan dugaan. Hal ini dibuat karena Kompas.com tetap menjaga objektivitas dalam setiap artikel berita yang sesuai dengan etika dalam pemberitaannya. Selanjutnya Kompas.com dapat memberikan dampak dan pengaruh terhadap pembaca secara psikologis. Penggunaan Foto setiap artikel berita Kompas.com merupakan foto yang sesuai dengan peristiwa *headline* pemberitaan.

Sedangkan pada artikel berita Republika Online yang telah dianalisa oleh peneliti dapat menjelaskan peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), meskipun terdapat beberapa berita yang cukup singkat. Peneliti menemukan pembedaan utama yaitu media Republika Online dapat meringkas peristiwa dan menggunakan narasumber sebagai informan utama. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan isi berita yang dibuat oleh Republika Online yaitu ajakan atau persuasif terhadap seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam menjaga suasana Pemilu 2024 yang damai. *Headline* berita yang dipublikasikan Republika Online lebih mudah untuk dipahami. *Lead* dalam berita sangat singkat atau *to the point* dan tidak ada penjelasan lebih mendalam terkait peringatan untuk netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Secara keseluruhan, tidak semua artikel berita Republika Online terdapat pernyataan opini, hanya ada empat berita yang memiliki pernyataan opini.

Hal ini disebabkan karena Republika Online dalam menyajikan berita sangat singkat dan hampir keseluruhan isi berita menggunakan kutipan dari narasumber. Selain itu, artikel berita ditutup dengan kutipan ajakan dari narasumber.

Kemudian dalam unsur skrip yaitu bagaimana cara penulis menceritakan suatu berita yang memiliki persamaan dengan struktur sintaksis yaitu tentang bagaimana fenomena peringatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilihan Umum 2024 berjalan. Hampir keseluruhan artikel pemberitaan Republika Online sudah mengandung unsur 5W + 1H, khususnya pada unsur *how* tentang respons narasumber yang memberi peringatan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian di unsur tematik yang menjelaskan bagaimana penulis berita menuliskan berita yang akurat dalam media Republika Online, peneliti menemukan penulis berusaha untuk memfokuskan pada peringatan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ajakan untuk menjaga kondisi yang kondusif selama proses Pemilihan Presiden atau Pemilihan Umum 2024.

Lalu pada unsur retorik menjelaskan bagaimana cara penulis yang fokus terhadap fakta-fakta yang akan dipublikasikan dalam artikel berita. Pada laman artikel berita yang diunggah oleh Republika Online, peneliti menemukan penegasan frasa “mengajak”, “menjaga”, “mengawasi”, dan “netralitas” yang ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara keseluruhan, penggunaan foto dalam artikel berita Republika Online memiliki hubungan dengan judul dan terdapat penggunaan gambar ilustrasi untuk menjaga sikap netralitas selama Pemilu 2024, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap pembedaan berita antara media Kompas.com dan Republika Online, Kompas.com lebih berupaya untuk membuat berita yang informatif yaitu kronologis masalah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilu 2024, serta Kompas.com berusaha untuk menyampaikan kritikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dengan selalu membawa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN. Kompas.com melakukan pemberitaan dengan objektif, *cover both side*, dan menyajikan pernyataan di latar belakang. Hampir keseluruhan artikel yang dianalisa oleh Kompas.com banyak menggunakan kutipan-kutipan dari berbagai sumber.

Sedangkan hasil analisis pbingkaian yang dilakukan oleh Republika Online tentang peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilu 2024 hanya mengutamakan sumber informasi dari tanggapan narasumber, lalu tanggapan tersebut dinarasikan secara singkat. Republika Online berusaha untuk mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam menjaga suasana Pemilu 2024 yang damai.

#### 4.4 Diskusi Teoritis

Pbingkaian pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Presiden 2024 dalam portal berita online Kompas.com dan Republika Online telah menunjukkan perbedaan dalam menjelaskan fakta-fakta yang dimunculkan dalam artikel berita. Kompas.com lebih memfokuskan pbingkaian pada peristiwa pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Presiden 2024. Dalam pbingkaiannya, Kompas.com menjelaskan masalah dan tanggapan dari berbagai tokoh untuk dijadikan satu berita. Sedangkan Republika Online memfokuskan pbingkaian pada peristiwa peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Presiden 2024, pbingkaian pada berita Republika Online lebih menekankan peringatan netralitas pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta ajakan agar menjaga serta mengawasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh seluruh elemen masyarakat. Republika Online lebih menuliskan teks deskriptif dari peristiwa salah satu yang dimana memiliki kekuasaan dalam menyuarakan informasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penelitian ini memakai sejumlah penelitian terdahulu sebagai panduan penelitian yang berjudul “Analisis *Framing* Pemberitaan Konflik Ganjar Pranowo *Versus* Puan Maharani Pada Media Online Detik.com” yang diteliti oleh Muhammad Zul Fithri dengan memakai metode penelitian analisis *framing* Zhongdang Pan & Gerald M. Kociki dengan perolehan analisis bahwa media Detik.com sebagai media terpopuler di Indonesia seharusnya memberikan penyampaian informasi yang berimbang seperti menggunakan *headline* berita yang lebih jelas dan tidak berlebihan. Berdasarkan analisis struktur skrip, detik.com belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+1H. Dalam tiga dari lima berita yang

dianalisis, unsur "*where*" atau lokasi kejadian tidak disebutkan. Selain itu, unsur "*how*" sering disajikan secara kurang mendalam, sehingga informasi yang diberikan menjadi kurang jelas. Analisis struktur tematik dan retorik pada pemberitaan konflik Ganjar Pranowo *versus* Puan Maharani menunjukkan bahwa detikcom belum bersikap berimbang. Detik.com cenderung menyoroti Ganjar Pranowo sebagai pihak yang bersalah, sementara pandangan Puan Maharani terkait konflik tersebut kurang diangkat. Pemilihan gambar juga kurang optimal, sering menggunakan foto yang sama seperti dalam berita sebelumnya. Pada penelitian ini memiliki perbedaan di peristiwa pemberitaan yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden 2024 pada media Kompas.com dan Republika Online.

Dalam analisis *framing* Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki terdapat empat struktur yakni sintaksis, skrip, tematik, serta retorik. Secara keseluruhan, analisis ini sudah dijelaskan pada hasil pembahasan di atas dan peneliti menemukan hasil beberapa perbedaan dari kedua portal berita Kompas.com dan Republika Online. Adapun struktur sintaksis, Kompas.com mempunyai *headline* yang menekankan pernyataan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tanggapan dari narasumber. Sebagai contoh yaitu "Mayoritas ASN Langgar Netralitas Karena Kampanye Di Media Sosial Jelang Pemilu". Sedangkan portal berita Republika Online memiliki *headline* pemberitaan yang mengutamakan peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai contoh yaitu "Komisi X Ingatkan ASN Pendidik Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024".

Pada struktur skrip atau bagaimana cara penulis menjelaskan peristiwa yang terjadi di berita. Peneliti menemukan sejumlah perbedaan antara kedua portal berita Kompas.com serta Republika Online. Kompas.com lebih menegaskan unsur *what* terkait informasi yang menjelaskan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden atau Pemilihan Umum 2024. Sedangkan Republika Online lebih menunjukkan unsur *how* tentang respons narasumber yang memberi peringatan pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam struktur tematik entah bagaimana cara penulis dalam menyajikan fakta di Kompas.com, peneliti mengetahui berita yang dipublikasikan berfokus pada tanggapan yang memiliki hubungan dengan kejadian atau peristiwa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan pada media Republika Online lebih fokus terhadap

tanggapan dan ajakan peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ajakan untuk menjaga sikap netralitas selama Pemilu 2024, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lembaga penyelenggara Pemilu.

Pada struktur retorik atau bagaimana cara penulis mengutamakan fakta dalam pemberitaan, Kompas.com memiliki sejumlah penegasan fakta yang digunakan narasumber dalam menunjukkan pelanggaran netralitas yang dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penekanan fakta akan memberikan pengaruh kepada para pembaca terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu atau Pilpres 2024. Sedangkan pada Republika Online lebih menekankan peringatan dan menggunakan kalimat persuasif tentang peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden 2024. Pemilihan gambar yang dipergunakan oleh kedua media Kompas.com dan Republika Online memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kompas.com lebih objektif untuk menyesuaikan gambaran dengan berita yang ingin disampaikan serta memberikan keterangan yang jelas. Sedangkan Republika Online lebih banyak menggunakan gambar ilustrasi untuk menjaga sikap netralitas selama Pemilu 2024, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara keseluruhan dalam kedua media tersebut, perangkat *framing* Pan dan Kosicki telah memenuhi rangkaian serta menunjukkan sebuah *framing* atau pembingkai pada suatu berita yaitu bagaimana cara jurnalis dalam menyusun suatu peristiwa, bagaimana cara jurnalis menceritakan sebuah peristiwa, dan bagaimana jurnalis memilih frasa untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Seorang jurnalis tentunya menggunakan strategi ini untuk memberikan keyakinan publik dalam membaca berita yang telah dipublikasikan dan tentunya bersifat fakta dan akurat (Eriyanto, 2018).

Pembingkai Kompas.com dan Republika Online jika dilihat sesuai konsep Aparatur Sipil Negara secara khusus merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bagian integral dari manajemen sumber daya manusia pemerintahan yang berada di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara negara, berperan di seluruh tingkatan pemerintahan. Mereka bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan administrasi negara

sebagai tenaga penggerak birokrasi pemerintah (Aji Ibrahim, 2019). Hal tersebut dapat diperlihatkan oleh Kompas.com dan Republika Online yang menjelaskan fungsi-fungsi dan peraturan dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam publikasi Kompas.com serta Republika Online tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Presiden 2024 sudah berkaitan dengan konsep yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ataupun yang lebih dikenal dengan sebutan UU ASN, merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini ialah landasan regulasi yang bertujuan untuk mempromosikan terciptanya ASN yang tersusun dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mempunyai integritas, profesionalisme, netralitas, serta tidak terpengaruh oleh intervensi politik (Kasn, 2017). *Political neutrality*, sebagai bagian dari prinsip *impartiality*, ialah hal yang penting pada tugas-tugas seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun mereka mempunyai hak untuk memilih, namun dalam menjalankan tugas mereka, mereka harus tetap netral dari pengaruh politik (Mokhsen, 2019).

Pembingkaian berita Kompas.com dan Republika Online jika dilihat dengan konsep jurnalisme Online yang merupakan sebuah proses mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menyebarluaskan berita secara daring melalui internet (Romelta, 2018). Kedua media tersebut sudah memiliki keterkaitan untuk menyebarluaskan artikel berita mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden 2024 sesuai dengan konsepnya. Kompas.com dan Republika Online sudah menyenarluaskan berita yang bersifat faktual atau sesuai dengan informasi dari data utama maupun narasumber.

Kemudian dalam konsep nilai berita yang digunakan Kompas.com dan Republika Online terdapat kesamaan yakni Kedekatan (*proximity*). Nilai berita Kedekatan (*proximity*) dapat dibuktikan dengan kalimat-kalimat ajakan dari narasumber yang sesuai dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Presiden 2024. Kemudian, kedekatan kedua media bisa diperlihatkan mulai dari timeline dan kutipan dari para narasumber yang melakukan wawancara. Pada penulisan berita tentunya mengandung nilai pemberitaan untuk memastikan bahwa artikel berita yang dipublikasikan memiliki kredibilitas.

Jika dilihat dengan konsep fungsi media sebagai *watchdog*, kedua media tersebut sudah menjalankan peran media sebagai tempat untuk melakukan interaksi terhadap isu sosial dengan peran yang penting. Khususnya dalam pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyelenggaran Pemilu yang melibatkan kasus netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) periode September 2023 hingga Januari 2024. Media massa sangat diharapkan sebagai bagian dalam mengawasi proses penjaga keamanan dengan memantau aktivitas lembaga-lembaga sosial, budaya, dan politik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Salam, 2018).

